

INDONESIA
INDEKS GANGGUAN
INDUSTRI TEMBAKAU
2025

LAPORAN INDEKS GANGGUAN INDUSTRI TEMBAKAU DI INDONESIA 2025

Dipublikasikan pada: Oktober, 2025

Tim Penulis:

Mouhamad Bigwanto
Mohammad Ainul Maruf
Rizki Akmal
Putri Marcelina

Desain Sampul:

Ridwan Kamil
Reza Avrilia Rahmawati

Ucapan Terima Kasih:

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Mary Assunta dan tim SEATCA atas bantuan teknis yang telah diberikan selama proses penulisan Laporan Indeks tahun 2025. Kami juga berterima kasih kepada Campaign for Tobacco-Free Kids (CTFK) atas penyediaan laporan pemantauan media harian terkait isu tembakau di Indonesia. Kami mengapresiasi dukungan pendanaan dari Bill and Melinda Gates Foundation. Laporan ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa bantuan dan masukan berharga dari semua pihak tersebut.

Sitasi yang disarankan:

Bigwanto, M., Maruf, MA., Akmal, R., Marcelina, P. (2025). *Laporan Indeks Gangguan Industri Tembakau di Indonesia 2025*. Jakarta: Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia

Dipublikasikan oleh:

Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia

Daftar Isi

Latar Belakang	2
Ringkasan Temuan	4
1. Partisipasi Industri dalam Pengembangan Kebijakan	4
2. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	4
3. Manfaat bagi Industri	5
4. Interaksi yang Tidak Perlu.....	5
5. Transparansi.....	5
6. Benturan Kepentingan	6
7. Upaya Pencegahan	6
Rekomendasi	6
Hasil dan Temuan.....	7
Indikator 1: Tingkat Partisipasi Industri dalam Pengembangan Kebijakan	7
Indikator 2: Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Industri	9
Indikator 3: Manfaat bagi Industri Tembakau.....	10
Indikator 4: Bentuk-Bentuk Interaksi yang Tidak Perlu.....	13
Indikator 5: Transparansi.....	15
Indikator 6: Benturan Kepentingan	15
Indikator 7: Upaya Pencegahan	16
REFERENSI	19
Lampiran: Sumber Informasi	28

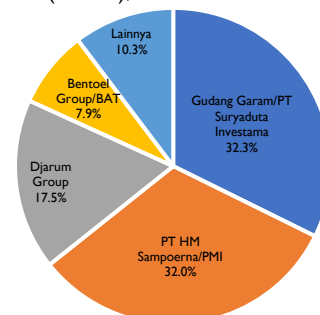
Latar Belakang

Indeks Gangguan Industri Tembakau merupakan alat penting bagi Indonesia untuk menilai sejauh mana industri tembakau memengaruhi kebijakan kesehatan masyarakat dan bagaimana pemerintah menanggapi. Dengan tingkat konsumsi tembakau yang masih sangat tinggi, keberadaan indeks ini memberikan gambaran objektif mengenai praktik-praktik industri yang dapat menghambat upaya pengendalian tembakau. Melalui indeks ini, masyarakat sipil bertujuan untuk mengenali titik-titik rawan dari campur tangan industri, sementara pemerintah didorong untuk merancang kebijakan yang lebih transparan dan berorientasi pada kesehatan masyarakat.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi merokok tertinggi di dunia. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023,¹ sekitar 27,1% penduduk Indonesia usia 10 tahun ke atas merupakan perokok aktif yang mencakup 52,4% laki-laki dan 1,1% perempuan. Sementara itu, prevalensi merokok pada remaja usia 10–18 tahun di Indonesia secara keseluruhan adalah 7,4% perokok, dengan 14,3% laki-laki dan 0,2% perempuan. Berdasarkan studi Global Burden of Diseases (GBD),² jumlah kematian yang dikaitkan dengan penggunaan tembakau di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 246.400 menjadikannya sebagai salah satu penyebab utama kematian yang dapat dicegah. Secara ekonomi, dampak dari konsumsi tembakau sangat signifikan. Biaya langsung dan tidak langsung yang diakibatkan oleh penyakit terkait tembakau diperkirakan mencapai antara Rp184,36 triliun hingga Rp410,76 triliun pada tahun 2019.³ Angka tersebut jauh melampaui kontribusi penerimaan cukai terhadap pendapatan negara di tahun yang sama, yaitu Rp164,87 triliun.⁴

Pasar tembakau di Indonesia didominasi oleh beberapa perusahaan besar, baik nasional maupun multinasional. Berdasarkan data pangsa pasar tahun 2023,⁵ Gudang Garam (PT Suryaduta Investama) mendominasi dengan pangsa pasar sebesar 32,3%, menggeser PT HM Sampoerna (afiliasi Philip Morris International) yang kini berada di posisi kedua sebesar 32,0%, lalu diikuti oleh Djarum Group (termasuk merek LA dan Djarum Super) sebesar 17,5%, Bentoel Group (afiliasi British American Tobacco) sebesar 7,9%, dan sisanya terdiri dari perusahaan lokal skala kecil dan menengah.

Pangsa Pasar Industri Tembakau (Rokok), Indonesia 2023



Indeks tahun ini menyoroti semakin meningkatnya keterlibatan tidak langsung industri tembakau melalui *front group*, CSR, dan narasi pengurangan risiko (*harm reduction*) sebagai strategi memengaruhi opini publik dan pengambil kebijakan. Bentuk campur tangan tidak langsung yang sistematis ini menjadi tantangan besar bagi perlindungan kebijakan kesehatan yang bebas dari kepentingan industri.

Dibandingkan dengan laporan indeks sebelumnya (2023), tingkat gangguan industri tembakau di Indonesia mengalami sedikit penurunan (Tabel 1). Namun, penurunan ini bukan disebabkan oleh adanya kebijakan atau regulasi baru yang bertujuan untuk mencegah campur tangan di dalam institusi pemerintahan, melainkan karena tidak adanya kasus baru yang terdokumentasi selama periode pelaporan ini, seperti keterlibatan industri dalam komite pengambilan keputusan di bidang kesehatan masyarakat, dukungan langsung dari presiden atau menteri terhadap kegiatan CSR mereka, atau keterlibatan industri dalam upaya penegakan hukum. Campur tangan industri dalam kebijakan kesehatan masyarakat masih sangat tinggi dan respons pemerintah masih cenderung berpihak pada kepentingan

industri tembakau. Pemerintah belum mempunyai aturan yang secara tegas dan menyeluruh melindungi proses perumusan kebijakan kesehatan dari pengaruh kepentingan industri tembakau.

Tabel 1. Skor Total Indeks Campur Tangan Industri Rokok di Indonesia, 2019–2025

	2019	2020	2021	2023	2025
Skor indeks	75	82	83	84	82

Metodologi

Laporan ini didasarkan pada kuesioner yang dikembangkan oleh Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA). Terdapat 20 pertanyaan yang merujuk pada pedoman Pasal 5.3. Informasi yang digunakan dalam laporan ini sepenuhnya berasal dari domain publik dan korespondensi resmi milik pemerintah. Penilaian dilakukan menggunakan sistem skor, dengan rentang nilai dari 0 hingga 5, di mana skor 5 menunjukkan tingkat gangguan industri yang paling tinggi, dan skor 1 menunjukkan gangguan yang rendah atau tidak ada. Semakin rendah skor, semakin baik bagi suatu negara. Skor 0 diberikan jika tidak terdapat bukti atau tidak relevan. Jika terdapat lebih dari satu bukti dalam suatu indikator, skor yang diberikan mencerminkan rata-rata dari keseluruhan temuan. Laporan ini mencakup informasi tentang insiden yang terjadi dari **April 2023** hingga **Maret 2025**, serta insiden sebelum tahun 2023 yang masih relevan hingga saat ini.

Ringkasan Temuan

I. Partisipasi Industri dalam Pengembangan Kebijakan

(Rangkungan bukti atau poin utama pada pertanyaan nomor 1–4)

Sejalan dengan aspirasi dari asosiasi industri tembakau dan kelompok pendukungnya, regulasi turunan dari UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, seperti Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK), mendapat penolakan dari sejumlah pejabat publik, termasuk beberapa anggota DPR RI, DPRD, dan kementerian terkait. Penolakan ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa regulasi tersebut akan merugikan industri tembakau, mematikan pedagang kecil, berdampak negatif pada petani tembakau, serta memicu peredaran rokok ilegal. Selain itu, terdapat indikasi dukungan dari sejumlah lembaga pemerintah dan legislatif terhadap produk rokok elektronik dan produk tembakau yang dipanaskan. Beberapa kementerian, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perindustrian, memberikan masukan agar produk tersebut diperlakukan berbeda dari rokok konvensional. Selain itu, kami menemukan adanya campur tangan industri tembakau asing lewat Peraturan Tetap RI di Jenewa untuk menindaklanjuti permintaan mereka terkait regulasi pengendalian tembakau di negara lain. Di level daerah, beberapa kepala daerah dan anggota DPRD menolak Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan alasan kekhawatiran dampak ekonomi terhadap buruh, pedagang kecil, dan pelaku usaha iklan. Keterlibatan industri dalam proses penyusunan kebijakan terjadi melalui mekanisme rapat dengar pendapat, yang dibenarkan oleh aturan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.



Ketua Komisi XIII DPR RI menjadi pembicara dalam diskusi membahas Rancangan Permenkes tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, Rabu (18/9/2024), di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.
Foto: Farid, suarasurabaya.net

2. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

(Rangkuman bukti atau poin utama pada pertanyaan nomor 5)

Sejumlah pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada perusahaan rokok atas kontribusi mereka di bidang lingkungan, pendidikan, perumahan, dan pengelolaan dana bagi hasil cukai tembakau. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan penghargaan Juara III CSR Award 2025 kepada PT Nojorono Kudus. Di Kudus, kolaborasi antara pemerintah daerah dan perusahaan rokok, seperti PT Djarum dan PT Nojorono, diwujudkan dalam program perumahan, pelestarian budaya, dan gerakan lingkungan berbasis digital. Pada masa kampanye pemilu, para calon presiden dan tim kampanyenya juga terlibat aktif dengan petani dan buruh industri tembakau, menunjukkan adanya pendekatan politik terhadap komunitas dan ekosistem tembakau. Meskipun beberapa perusahaan menyatakan netral, indikasi dukungan terhadap kandidat tertentu mencerminkan



T. Sugiyanto selaku CSR Manager PT Nojorono Tobacco International, menerima secara langsung penghargaan dari Taj Yasin Maimoen selaku Wakil Gubernur Jawa Tengah
Foto: Kontan

adanya hubungan strategis antara aktor politik dan industri tembakau untuk meraih dukungan ekonomi dan elektoral.

3. Manfaat bagi Industri

(Rangkuman bukti atau poin utama pada pertanyaan nomor 6–7)

Pemerintah sempat merencanakan kenaikan tarif cukai rokok pada tahun 2025, tetapi membatalkannya akibat tekanan dan penolakan dari sejumlah lembaga legislatif dan eksekutif, seperti DPR RI, DPD RI, DPRD, dan beberapa kepala daerah. Sebaliknya, Kementerian Keuangan memberikan berbagai bentuk keistimewaan dan insentif kepada industri tembakau, seperti relaksasi pelunasan pita cukai, tarif cukai lebih rendah untuk SKT, dan kemudahan perizinan melalui aglomerasi pabrik. Pengenaan cukai yang lebih rendah tersebut didukung juga oleh Kementerian Perindustrian dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Pemerintah daerah banyak memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk mendukung petani dan buruh industri tembakau melalui bantuan langsung tunai (BLT), pelatihan, penyediaan alat pertanian, pembayaran iuran BPJS, hingga promosi tembakau, seperti melalui Aroma Sendja Festival. Selain itu, Bea Cukai juga terus memfasilitasi perdagangan dan ekspor produk tembakau, termasuk melalui pemberian izin kawasan berikatⁱ dan pembebasan cukai ekspor sesuai PMK 59/PMK.04/2017.

4. Interaksi yang Tidak Perlu

(Rangkuman bukti atau poin utama pada pertanyaan nomor 8–10)

Berbagai pejabat di Indonesia, mulai dari menteri hingga kepala dinas, terlibat dalam interaksi yang menguntungkan industri tembakau, termasuk kunjungan ke pabrik rokok, peresmian fasilitas produksi, serta dukungan terhadap ekspor dan pengembangan usaha industri tembakau. Wakil Menteri Perdagangan menerima kunjungan Direktur Hubungan Eksternal PT HM Sampoerna di Kantor Kementerian Perdagangan dan menyatakan dukungan untuk UKM Go Global. Gubernur Jawa Timur hadir dalam peresmian fasilitas produksi SKT milik PT HM Sampoerna dan turut menyampaikan apresiasi atas kontribusi Sampoerna terhadap perekonomian daerah. Pemerintah juga terlibat dalam kerja sama langsung dengan perusahaan rokok atau anak usahanya, seperti pembangunan infrastruktur (bandara Dhoho dan jalan tol Kediri-Tulungagung) dan program pemberdayaan UMKM. Selain itu, terdapat pernyataan di media yang mengindikasikan dukungan pemerintah terhadap pendekatan *Tobacco Harm Reduction* (THR).



Wamendag, Dyah Roro Esti menerima kunjungan Direktur Hubungan Eksternal PT HM Sampoerna Tbk, Elvira Lianita di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta.
Foto: Kemendag RI

5. Transparansi

(Rangkuman bukti atau poin utama pada pertanyaan nomor 11–12)

Pemerintah Indonesia tidak memiliki mekanisme atau kebijakan standar yang mewajibkan pengungkapan terbuka atas interaksi dengan industri tembakau, termasuk tidak adanya kewajiban pendaftaran bagi entitas, organisasi, atau individu yang mewakili

ⁱ izin yang diberikan kepada perusahaan untuk mendirikan dan menjalankan kegiatan usaha di dalam Kawasan Berikat, suatu kawasan dengan batas-batas tertentu di dalam wilayah pabean yang diberikan perlakuan khusus sesuai ketentuan kepabeanan.

industri tersebut. Meskipun daftar hadir dan notulen pertemuan dicatat dalam interaksi formal, dokumen tersebut tidak tersedia untuk publik.

6. Benturan Kepentingan

(Rangkuman bukti atau poin utama pada pertanyaan nomor 13–15)

Meskipun tidak ditemukan kasus baru dalam dua tahun terakhir, beberapa mantan pejabat pemerintah masih memegang posisi penting dalam organisasi yang terkait dengan industri tembakau. Tidak ada kebijakan yang melarang sumbangan politik dari industri tembakau, dan pejabat yang terlibat kampanye politik hanya diwajibkan mengundurkan diri. Saat ini, tidak ada pejabat aktif yang bekerja di industri tembakau, tetapi ditemukan seorang ASN aktif di BRIN yang menjabat sebagai ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO).

7. Upaya Pencegahan

(Rangkuman bukti atau poin utama pada pertanyaan nomor 16–20)

Pemerintah Indonesia belum memiliki kebijakan khusus yang mewajibkan pencatatan interaksi dengan industri tembakau maupun pelaporan berkala atas aktivitas industri tersebut secara menyeluruh. Kode etik bagi pejabat publik masih bersifat umum dan hanya Kementerian Kesehatan yang memiliki pedoman spesifik untuk menghindari benturan kepentingan dengan industri tembakau melalui Permenkes No. 50/2016. Hanya sebagian kecil informasi industri, seperti volume produksi dilaporkan ke instansi tertentu, dan belum ada kewajiban pelaporan aktivitas pemasaran atau lobi. Kesadaran internal di pemerintahan mengenai pedoman Pasal 5.3 FCTC juga belum dibangun secara sistematis dan konsisten di seluruh lembaga pemerintah.

Rekomendasi

- Pemerintah perlu membatasi keterlibatan industri dalam proses kebijakan dengan menegakkan pembatasan partisipasi industri dalam proses penyusunan kebijakan kesehatan, khususnya terkait zat adiktif, serta menghindari undangan khusus kepada industri tembakau dalam konsultasi publik terkait peraturan kesehatan.
- Pemerintah pusat dan daerah perlu melarang penerimaan bantuan/sumbangan dari industri tembakau dalam bentuk CSR atau hibah, serta perlu peninjauan ulang pemanfaatan DBHCHT agar tidak digunakan untuk kegiatan yang memperkuat citra industri. Publikasi CSR yang dilakukan di media juga menjadi catatan penting, di mana aturan terkait larangan publikasi di media untuk CSR industri tembakau belum diterapkan dengan serius oleh pemerintah.
- Pemerintah perlu menghentikan kebijakan yang menguntungkan industri dengan mengkaji ulang berbagai kebijakan fiskal (misalnya tarif cukai rendah, insentif KIHT/SIHT) yang menguntungkan industri dan berpotensi melemahkan pengendalian tembakau. Selain itu, dana publik semestinya tidak digunakan untuk mempromosikan produk hasil tembakau.
- Pemerintah perlu membatasi interaksi pejabat publik dengan industri tembakau hanya untuk urusan regulasi yang bersifat teknis, dan mewajibkan setiap interaksi tersebut dilaporkan secara terbuka dengan mencantumkan waktu, peserta, agenda, serta hasil pertemuan melalui portal resmi pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
- Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang melarang penerimaan dukungan, hadiah, atau kontribusi dari industri tembakau oleh pejabat dan institusi publik, serta melakukan edukasi rutin pada semua sektor pemerintahan mengenai bahaya konflik kepentingan dan pentingnya menjaga integritas dalam proses penyusunan kebijakan.

Indonesia

Indeks Gangguan Industri Tembakau 2025

Hasil dan Temuan

	0	1	2	3	4	5
Indikator 1: Tingkat Partisipasi Industri dalam Pengembangan Kebijakan						
1. Pemerintah ⁱⁱ menerima, mendukung, atau memberikan persetujuan terhadap tawaran bantuan oleh industri tembakau, atau berkolaborasi dengan industri tembakau atau entitas/individu yang bekerja untuk kepentingan industri ⁱⁱⁱ dalam menetapkan atau melaksanakan kebijakan kesehatan masyarakat terkait pengendalian tembakau ^{iv} (Rec 3.4)						5
Penolakan terhadap regulasi kesehatan oleh lembaga legislatif dan eksekutif: Senada dengan aspirasi dari asosiasi industri tembakau dan kelompok pendukungnya, pasal pengamanan zat adiktif dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Kesehatan juga menghadapi penolakan dari Menteri Perindustrian,⁶⁻⁸ Komisi IV DPR RI,⁹⁻¹² Komisi IX DPR RI,¹³⁻¹⁵ dan DPRD Temanggung¹⁶ karena dinilai menyetarakan tembakau dengan narkoba dan adanya kekhawatiran aturan ini merugikan komoditas tembakau yang mengandung zat adiktif legal berupa nikotin. Setelah RUU disahkan menjadi UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terdapat narasi penolakan dari Cawapres nomor urut 3.^{17, 18} Tidak selesai sampai di situ, Cawapres nomor urut 3 juga menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai turunan dari UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.^{19, 20} Komisi IX DPR RI,²¹ Komisi XI DPR RI,²²⁻²⁷ Deputi Bidang Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM,²⁸ dan Asisten Deputi V Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian juga ikut menolak RPP tersebut.²⁹ Selain itu, penolakan juga muncul dari Wakil Ketua DPRD Jawa Timur³⁰⁻³² dan Wakil Ketua DPRD Temanggung.^{33, 34} Alasan penolakan masih sama seperti dengan penolakan RUU, yakni rancangan peraturan tersebut dianggap berpotensi merugikan komoditas tembakau, mematikan pedagang kecil, dan minim partisipasi publik. Setelah RPP disahkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, penolakan masih terus bergulir dari Komisi IV DPR RI,^{35, 36} Komisi VI DPR RI,³⁷⁻³⁹ dan Komisi IX DPR RI.^{40, 41} Penolakan serupa juga muncul terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang merupakan turunan dari PP Kesehatan. RPMK mendapat tanggapan dari berbagai lembaga, antara lain Badan Legislasi DPR RI,⁴² Komisi IX DPR RI,⁴³ Komisi XIII DPR RI,⁴⁴⁻⁴⁶ Kementerian Ketenagakerjaan,⁴⁷⁻⁴⁹ dan DPRD Provinsi Jawa Timur.⁵⁰ Dalam RPMK tersebut, terdapat bagian mengenai standarisasi kemasan yang juga mendapatkan penolakan dari Badan Legislasi DPR RI,⁵¹ Komisi IX DPR RI,⁵²⁻⁵⁵ Komisi XI DPR RI,⁵⁶⁻⁵⁹ Kemenko Bidang Perekonomian,⁶⁰⁻⁶² Kementerian Perindustrian,⁶³ Kementerian Perdagangan,⁶⁴⁻⁶⁶ Kementerian Pertanian,^{67, 68} dan Kementerian Keuangan.^{69, 70} RPMK dianggap berpotensi menambah beban keputusan hubungan kerja, berdampak negatif bagi petani tembakau dan merugikan industri hasil tembakau, mendorong peredaran rokok ilegal, menghambat penerimaan cukai, serta dianggap melewati batas kewenangan Kementerian Kesehatan. Penolakan terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok:						

ii Istilah “pemerintah” mengacu pada pejabat publik siapa pun, baik yang bertindak dalam lingkup wewenangya maupun tidak, selama mereka terselubung dalam wewenang tersebut atau bergantung pada pihak lain yang mempunyai wewenang tersebut.

iii Istilah “industri tembakau” mencakup pihak-pihak yang mewakili kepentingan mereka atau bekerja untuk memajukan kepentingan mereka, termasuk industri tembakau milik negara.

iv “Penawaran bantuan” dapat berupa perancangan undang-undang, masukan teknis, rekomendasi, ataupun studi banding pengawasan.

012345					
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di masing-masing daerah mendapatkan penolakan dari DPRD Provinsi Jawa Timur,^{71, 72} DPRD Kota Balikpapan,^{73, 74} DPRD Kabupaten Kulon Progo,^{75, 76} dan Pemerintah Provinsi Riau (yang menolak Ranperda KTR dari Pemerintah Kota Pekanbaru).⁷⁷ Rancangan peraturan tersebut dianggap dapat mematikan ekonomi daerah, berdampak pada petani tembakau, buruh rokok, pedagang kecil dan pelaku usaha periklanan, serta mengurangi pendapatan daerah dari retribusi iklan. Sementara itu, DPRD Provinsi Jawa Timur juga menginisiasi dibentuknya Ranperda Pertembakauan.⁷⁸ Dukungan terhadap aspirasi industri: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima aspirasi buruh terkait dengan penolakan kenaikan cukai rokok dan penolakan kawasan tanpa rokok, serta berkomitmen untuk memfasilitasi perwakilan buruh beraudiensi langsung dengan pemerintah pusat.^{79, 80} Setelah gagal mendorong RUU Industri Hasil Tembakau, Badan Legislasi DPR RI mendorong RUU Komoditas strategis yang di dalamnya termasuk komoditas tembakau.⁸¹ Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi pembicara dalam kegiatan Asia Pacific Harm Reduction Forum (APHRF) pada bulan Juli 2024 di Jakarta, serta menyatakan dukungannya terhadap konsep pengurangan risiko dan sedang melakukan penelitian di bidang produk tembakau alternatif dengan hasil sementara menunjukkan bahwa produk tersebut lebih rendah risiko.^{82, 83}					
2. Pemerintah menerima, mendukung, dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan atau peraturan yang disusun oleh dan atau berkolaborasi dengan industri tembakau. (Rec 3.4)					
Pada tahun ini (2025), tidak ada inisiatif untuk membuat RUU atau <i>roadmap</i> yang mengakomodasi industri tembakau. Namun, kami menemukan bahwa Kementerian Perindustrian memberikan dukungan kepada industri rokok elektronik dengan memberikan masukan kepada Kementerian Kesehatan untuk meminta agar rokok elektronik diperlakukan berbeda.⁸⁴ Selain itu, pada UU Kesehatan, Panja RUU Kesehatan DPR RI menyetujui pasal rokok konvensional dan rokok elektronik dipisah.⁸⁵ Hal ini merupakan bentuk akomodasi dari masukan dari industri rokok elektronik. Selain itu, Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa mengirimkan surat kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Agama, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri KLHK, Sekretariat Kabinet, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kepala BSN, dan Kepala BPOM agar menindaklanjuti permintaan Japanese Tobacco International (JTI) untuk membahas notifikasi <i>Technical Barriers to Trade</i> (TBT) mengenai peraturan larangan 27 jenis perisa pada produk tembakau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Taiwan, yang dianggap berpotensi menghambat ekspor produk tembakau dari Indonesia.⁸⁶ Dukungan terhadap industri tembakau memang sering terjadi, terutama dari politisi nasional. Contohnya pada saat kampanye pemilihan presiden, semua kandidat presiden memberikan dukungan dan respons positif terhadap industri tembakau. Saat masa kampanye, calon presiden nomor urut 3 Ganjar–Mahfud MD menemui petani tembakau di Jombang⁸⁷ dan melakukan kunjungan ke pabrik tembakau PT Sari Tembakau Harum di Kendal untuk menemui buruh linting tembakau.⁸⁸⁻⁹⁰ Selain itu, Tim Pemenangan Nasional (Timnas) pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar menampung aspirasi petani tembakau yang tergabung dalam Asosiasi Petani dan Pekerja Tembakau Nusantara (APPTN) dan ingin komoditas lebih dikenal dunia.⁹¹ Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon nomor urut 2 Prabowo–Gibran menyatakan akan mengakomodasi kebijakan jalan tengah ekosistem tembakau nasional.^{92, 93} Meskipun perusahaan besar seperti Djarum, Sampoerna, dan Adaro menyatakan netral,⁹⁴ klaim dukungan mereka terhadap kandidat tertentu (Prabowo) mencerminkan kecenderungan					

	0	1	2	3	4	5
pemerintah dan aktor politik untuk merangkul dukungan dari industri besar, termasuk industri tembakau, demi kepentingan elektoral dan ekonomi.						
3. Pemerintah mengizinkan/mengundang industri tembakau untuk duduk dalam komite/kelompok penasihat antarlembaga/sektor yang menetapkan kebijakan kesehatan masyarakat. (Rec 4.8)					4	
Tidak ada bukti baru bahwa industri rokok secara resmi menjadi anggota dalam komite antar kementerian atau kelompok kerja multisektor pemerintah yang menetapkan kebijakan kesehatan masyarakat selama periode ini. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, terdapat beberapa kasus di mana perwakilan dari industri rokok menjadi anggota komite teknis yang bertugas menyusun Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk cairan rokok elektronik dan produk tembakau yang dipanaskan. Standar ini diterbitkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan diketuai oleh perwakilan dari Kementerian Perindustrian. SNI tersebut hingga kini masih digunakan oleh Kementerian Perindustrian sebagai acuan dalam memengaruhi rancangan regulasi mengenai batas maksimal kadar nikotin dan tar pada produk tembakau.						
4. Pemerintah menominasikan atau mengizinkan perwakilan dari industri tembakau (termasuk industri tembakau milik negara) atau anak perusahaannya dalam delegasi ke Conference of the Parties (COP) atau menerima dukungan dari industri untuk menjadi delegasi (misalnya COP 4 & 5, INB 4 5, WG). ^v (Rec 4.9 & 8.3) <i>Untuk tahun non-COP, samakan skor seperti tahun sebelumnya.</i>	0					
Indikator ini tidak berlaku karena Indonesia bukan negara anggota WHO FCTC.						
Indikator 2: Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Industri						
5. A. Lembaga pemerintah atau pejabatnya memberikan persetujuan, mendukung, menjalin kemitraan dengan, atau berpartisipasi dalam kegiatan industri tembakau yang digambarkan sebagai kegiatan “tanggung jawab sosial” (CSR) perusahaan atau program “berkelanjutan”. Sebagai contoh, program-program terkait lingkungan. (Rec 6.2)						
B. Pemerintah (lembaga dan pejabatnya) menerima sumbangan CSR^{vi} (berupa uang atau bentuk lainnya, termasuk sumbangan CSR) dari industri tembakau atau mereka yang bekerja untuk kepentingan industri tembakau (misalnya melalui kontribusi politik, sosial, finansial, pendidikan, komunitas maupun bentuk kontribusi lainnya (Rec 6.4), termasuk juga kegiatan lingkungan atau tanggung jawab produsen terhadap lingkungan/<i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR) (COP10 Dec). CATATAN: Kegiatan penegakan hukum tidak termasuk karena hal tersebut dibahas dalam pertanyaan lain					4	
5A Komisi IX DPR RI mengusulkan agar pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) didanai cukai rokok.^{95, 96} Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan penghargaan Juara III CSR Award 2025 pada Kategori Swasta kepada PT Nojorono Kudus.⁹⁷ Penjabat Bupati Bondowoso mengawal dan mengapresiasi penyaluran bantuan beras milik pengusaha rokok (CV Trisno Adi) di Kabupaten Bondowoso.^{98, 99} Pemerintah Kabupaten Kudus (PJ Bupati Kudus didampingi oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan						

^v Daftar lampiran sejak tahun 2009 agar responden dapat menghitung frekuensinya, <http://www.who.int/fctc/cop/en/>

^{vi} Kontribusi untuk bidang politik, keuangan/dana sosial, pendidikan, komunitas, keahlian teknis atau pelatihan untuk melawan penyelundupan atau bentuk kontribusi lainnya.

						0	1	2	3	4	5
Hidup) memberikan apresiasi kepada PT Nojorono Kudus (salah satu pelopor rokok kretek di Indonesia) atas upaya peningkatan kualitas lingkungan.¹⁰⁰ Bupati Malang mengeluarkan kebijakan agar perusahaan mengucurkan dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) perusahaan ke sektor pendidikan, termasuk perusahaan rokok dengan tidak memasang iklan di sekolah.¹⁰¹ 5B Penjabat Bupati Kudus mengapresiasi kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan PT Djarum, melalui program CSR-nya, yang telah mewujudkan bantuan 100 Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH).¹⁰² Selain itu, Bakti Lingkungan Djarum Foundation (BLDF) juga bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup (PKPLH) membentuk gerakan generasi muda berbasis digital “Kudus ASIK (Apik Resik)”, setelah sebelumnya membangun Pusat Pengolahan Organik (PPO).¹⁰³ Museum Kretek mendapatkan hibah berupa empat buah meja linting rokok kretek dari PT Nojorono Kudus yang diterima oleh Penjabat Bupati Kudus dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kudus.^{104,105} Pemerintah Kabupaten Gowa menjalin kerja sama dengan Putera Sampoerna Foundation di bidang pendidikan dengan menyasar siswa SMA untuk mendapatkan beasiswa ke Sampoerna University dan program peningkatan kapasitas guru bagi guru SD dan SMP di Kabupaten Gowa.¹⁰⁶ Pemerintah Kota Padang juga menjalin kerja sama serupa dengan Putera Sampoerna Foundation dengan memberikan beasiswa bagi lulusan SMA yang ingin melanjutkan pendidikan di Sampoerna University dengan sistem <i>dual degree</i> kerja sama dengan University of Arizona.¹⁰⁷ Pemerintah Kabupaten Pasaman juga menjalin kerja sama serupa dengan Putera Sampoerna Foundation.¹⁰⁸ Pemerintah Kota Solok juga menjalin kerja sama serupa dengan Putera Sampoerna Foundation ditambah program pengembangan <i>games</i> (Junior Game Creator).¹⁰⁹ Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan bekerja sama dengan PT HM Sampoerna dalam rangka pendirian laboratorium guna melakukan penelitian terkait tanaman tembakau serta dengan Sampoerna Retail Community (SRC) untuk revitalisasi pasar di Masjid Cheng Ho.¹¹⁰ Pemerintah daerah (lima desa di sekitar pabrik Sukorejo, Jawa Timur) menerima kontribusi CSR lingkungan dari Sampoerna (afiliasi Philip Morris International) melalui program AWS Water Stewardship, termasuk infrastruktur untuk sanitasi, pengelolaan sampah, dan kegiatan restorasi daerah aliran sungai.¹¹¹											
Indikator 3: Manfaat bagi Industri Tembakau											
6. Pemerintah mengakomodasi permintaan dari industri tembakau untuk waktu pelaksanaan yang lebih lama atau penundaan pelaksanaan peraturan terkait pengendalian tembakau (misalnya, tenggat waktu penerapan aturan peringatan kesehatan bergambar umumnya diberikan selama 180 hari, dan penerapan kenaikan cukai dapat dilaksanakan dalam waktu 1 bulan). (Rec 7.1)											5
Pada awalnya, pemerintah berencana menaikkan tarif cukai rokok untuk tahun 2025.¹¹² Namun, terjadi penolakan dari Badan Legislasi DPR RI,¹¹³ Komisi XI DPR RI,¹¹⁴⁻¹¹⁸ Ketua DPD RI,^{119, 120} Staf Khusus Menteri Keuangan,¹²¹⁻¹²³ DPRD Provinsi Jawa Timur,¹²⁴ Penjabat Gubernur Jawa Timur,^{125, 126} DPRD Kabupaten Pati,¹²⁷ Wakil Bupati Sleman,¹²⁸ serta Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah pada Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi.^{129, 130} Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan kemudian membatalkan kenaikan cukai hasil tembakau pada tahun 2025.¹³¹ Meskipun sudah dibatalkan, Gubernur Jawa Barat terus menyuarakan penolakan terhadap kenaikan cukai rokok dengan alasan menekan peredaran rokok ilegal.¹³²⁻¹³⁴											

	0	1	2	3	4	5
7. Pemerintah memberikan berbagai bentuk keistimewaan, insentif, pembebasan pajak/cukai, subsidi, insentif finansial, atau manfaat khusus lainnya kepada industri tembakau. (Rec 7.3)						5
Kemudahan perizinan, pelunasan pita cukai, dan dukungan lainnya untuk industri tembakau dari Ditjen Bea Cukai: Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 22 Tahun 2023 tentang Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau yang memberikan kemudahan perizinan di bidang cukai, produksi barang kena cukai hasil tembakau, dan penundaan pembayaran cukai yang diberikan dalam jangka waktu penundaan 90 hari kepada pengusaha pabrik yang menjalankan kegiatan di tempat aglomerasi.^{135, 136} Selain itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan kembali (sejak 2021) memberi relaksasi pelunasan pita cukai 90 hari dari normalnya 2 bulan terhadap pemesanan pita cukai (CK-1) yang diajukan sejak 1 Maret 2024 hingga 31 Oktober 2024.^{137, 138} Bea Cukai Provinsi Jawa Timur I memberikan izin fasilitas (kepabeanan) kawasan berikat kepada produsen rokok elektronik untuk menyediakan kemudahan prosedural dan fiskal kepada perusahaan.¹³⁹ Bea Cukai Juanda mendukung perdagangan internasional produk tembakau melalui program Authorized Economic Operator (AEO), yang memberikan kemudahan dan keuntungan bagi pelaku usaha dalam kegiatan ekspor dan impor.¹⁴⁰ Bea Cukai Yogyakarta memberikan izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) atas penambahan lokasi baru PT Linting Tembakau Indonesia yang memproduksi tembakau iris (TIS)¹⁴¹ serta memfasilitasi ekspor tembakau iris milik PT Taru Martani ke Jepang dengan tidak memungut cukai setelah melalui pemeriksaan.¹⁴² Sementara itu, Bea Cukai Jember memfasilitasi pembebasan cukai ekspor cerutu milik PT Besuki Raya Cigar ke Jerman¹⁴³ dan Bea Cukai Semarang memfasilitasi pembebasan cukai ekspor rokok milik PT Bahtera Nusantara ke Malaysia, Singapura, Dubai, dan Uni Emirat Arab.^{144, 145} Fasilitas tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 59/PMK.04/2017 tentang Tidak Dipungut Cukai.¹⁴⁶ Dukungan tarif lebih rendah untuk SKT: Kementerian Perindustrian mengungkapkan keberpihakannya kepada industri tembakau dengan mendukung penetapan tarif sigaret kretek tangan (SKT) yang lebih rendah dibandingkan dengan rokok mesin.^{147, 148} Selain itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran menyatakan komitmennya dalam mendukung sektor padat karya termasuk industri sigaret kretek tangan (SKT) melalui implementasi pengenaan cukai yang lebih rendah.¹⁴⁹ Penggunaan dana DBHCHT untuk sektor tembakau: Pada kuartal pertama tahun 2025, Pemerintah Provinsi (Gubernur) Jawa Tengah menyalurkan Rp 6,4 Miliar DBHCHT kepada buruh industri tembakau.^{150, 151} Sementara itu, Penjabat Gubernur Lampung melakukan panen tembakau dan menyerahkan bantuan pupuk kepada kelompok tani tembakau.¹⁵² Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) DKI Jakarta mengatakan penerimaan cukai yang ada di DKI Jakarta mayoritas disumbang oleh rokok elektrik dan menekankan bahwa sumbangsih perokok elektrik sangat bermanfaat bagi bea cukai DKI.¹⁵³ Pemerintah (Dinas Perkebunan) Provinsi Jawa Barat menggunakan DBHCHT untuk menggelar acara Aroma Sendja Festival 2024 di alun-alun Kabupaten Sumedang dalam rangka mempromosikan dan memperluas pasar hasil tembakau di Jawa Barat.¹⁵⁴ Penjabat Bupati Lombok Timur menghadiri acara penyerahan bantuan alat mesin pertanian yang bersumber dari DBHCHT tahun 2024 oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur untuk						

kelompok tani dan menyatakan agar bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas produksi tembakau rajang.¹⁵⁵

Sejumlah daerah menggunakan DBHCHT sebagai bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan kepada petani tembakau dan/atau buruh industri tembakau. Contohnya Pemerintah Kabupaten Blora, Pemerintah Kabupaten Sumenep,¹⁵⁶ dan Pemerintah Kabupaten Pati¹⁵⁷ yang memberikan BLT kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok.¹⁵⁸⁻¹⁶⁰ Selain itu Pemerintah Kabupaten Kudus,^{161, 162} Pemerintah Kabupaten Kendal,^{163, 164} dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dilaporkan memberikan BLT kepada buruh rokok.¹⁶⁵ Pemerintah Kabupaten Kudus juga pernah menggunakan DBHCHT untuk menyelenggarakan pelatihan kerja untuk para pekerja rokok dan keluarganya.¹⁶⁶

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo (bekerja sama dengan Bea Cukai),¹⁶⁷ Pemerintah Kabupaten Batang,¹⁶⁸ dan Pemerintah Kabupaten Tegal¹⁶⁹ menggunakan DBHCHT untuk menyelenggarakan pelatihan melinting tembakau.

Pemerintah Kabupaten Lombok¹⁷⁰ dan Pemerintah Kabupaten Sumedang^{171, 172} menggunakan DBHCHT untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan pekerja di sektor pertanian tembakau.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pamekasan alokasikan DBHCHT 2024 untuk peningkatan nilai produksi pertanian tembakau¹⁷³ dan juga bantuan mesin perajang tembakau dan pembuat pupuk organik.¹⁷⁴ Pada tahun 2025, mereka kembali memberikan bantuan berupa pupuk, peralatan pertanian, hingga pelatihan pengolahan pascapanen kepada 15 kelompok tani tembakau dan petani komoditas pendukung tembakau.¹⁷⁵ Sementara itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Sumedang menggunakan DBHCHT untuk memberikan bantuan mesin traktor (dari DBHCHT) kepada Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Sumedang¹⁷⁶ dan juga pengembangan varietas tembakau unggulan.¹⁷⁷

Pemerintah Kabupaten Sumedang (Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Pertanian pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang/Sekretariat DBHCHT Kabupaten Sumedang) mengatakan bahwa DBHCHT harus dipergunakan untuk mendorong ekonomi masyarakat di bidang pertanian tembakau dan usaha tembakau.¹⁷⁸

Bagian Perekonomian Setda Kuningan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema 'Optimalisasi Potensi Para Kelompok Petani Tembakau di Kabupaten Kuningan' guna meningkatkan produktivitas petani tembakau dengan mengundang Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), pemilik Pabrik Hasil Tembakau Rokok SKT Darma Kasyifa Kuningan dan perwakilan SKPD. Dalam kesempatan itu, Perwakilan dari Bea Cukai Cirebon menyampaikan pentingnya ketepatan waktu realisasi program DBHCHT dan program ini harus tepat sasaran, khususnya untuk kelompok petani tembakau dan buruh pabrik rokok.¹⁷⁹

Pemerintah Kabupaten Pamekasan,^{180, 181} Pemerintah Kabupaten Kudus,¹⁸²⁻¹⁸⁴ dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah¹⁸⁵ membangun Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) menggunakan DBHCHT. SIHT Kudus juga menerima alokasi dana DBHCHT untuk pemeliharaan rutin.¹⁸⁶

Industri Hasil Tembakau (IHT) sebagai sektor prioritas dan dukungan pemerintah daerah untuk sektor ini:

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Jawa Timur menjadikan Industri Hasil Tembakau (IHT) sebagai salah satu dari lima sektor prioritas yang akan mengoptimalkan pendapatan negara (APBN).¹⁸⁷ Selain itu, Kabupaten Ponorogo¹⁸⁸ dan Kabupaten Sumedang¹⁸⁹ juga menjadikan tembakau sebagai salah satu komoditi unggulan. Hal ini berpotensi menimbulkan sejumlah konsekuensi, antara lain meningkatnya pemberian fasilitas dari pemerintah kepada industri tembakau, melemahnya regulasi pengendalian tembakau, meningkatnya interferensi

						0	1	2	3	4	5
industri dalam kebijakan kesehatan, semakin luasnya paparan iklan rokok kepada anak-anak, serta bertambahnya beban ekonomi dan kesehatan masyarakat. ¹⁹⁰⁻¹⁹³											
Pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan bantuan benih ¹⁹⁴ dan pupuk ¹⁹⁵ kepada petani tembakau. Pemerintah Kabupaten Gowa memberikan bantuan pupuk kepada petani tembakau. ¹⁹⁶											
Pemerintah Kabupaten Kudus memfasilitasi dan menghubungkan petani tembakau dengan calon pembeli. ¹⁹⁷ Bupati Demak mengajak semua pihak untuk menyukseskan penghasil tembakau di Kabupaten Demak. ¹⁹⁸											
Indikator 4: Bentuk-bentuk Interaksi yang Tidak Perlu											
8. Para pejabat tingkat tinggi pemerintah (seperti Presiden/Perdana Menteri atau Menteri ^{vii}) bertemu/membangun hubungan dengan industri tembakau, seperti menghadiri acara sosial dan acara lain yang disponsori atau diselenggarakan oleh industri tembakau atau pihak yang bekerja untuk kepentingan industri tembakau. (Rec 2.1)											5
Menteri Perdagangan memfasilitasi pertemuan petani tembakau asal Temanggung dan Wonosobo dengan pemilik pabrik rokok PT Gudang Garam Tbk di Kediri membahas harga jual tembakau.¹⁹⁹ Sementara itu, Ketua DPR RI melakukan kunjungan ke pabrik pelintingan sigaret kretek tangan di Bojonegoro.^{200, 201} Tak lama setelahnya, Ketua MPR RI juga melakukan kunjungan ke pabrik sigaret kretek tangan PT Mitra Prasmitha Selaras mitra PT HM Sampoerna di Kebumen.²⁰² Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM dan Pj. Gubernur Jawa Timur meresmikan dan menghadiri acara peresmian fasilitas produksi Sigaret Kretek Tangan Sampoerna di Blitar dan Tegal.^{203, 204} Kejadian interaksi tidak perlu yang melibatkan pejabat dengan level di bawah Menteri: Wakil Menteri Perdagangan menerima kunjungan Direktur Hubungan Eksternal PT HM Sampoerna di Kantor Kementerian Perdagangan dan menyatakan dukungan untuk UKM Go Global.²⁰⁵ Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menghadiri acara pelepasan ekspor dan ekspansi rokok elektronik dan memberikan apresiasi atas komitmen investasi Sampoerna.²⁰⁶ Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan meresmikan pabrik sigaret kretek tangan (SKT) PT Attin Sigaret Indonesia yang merupakan Mitra Produksi Sigaret (MPS) PT HM Sampoerna di Jateng, Kabupaten Karanganyar.²⁰⁷ Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebutkan peran sektor tembakau sangat vital sebagai sumber pendapatan negara, pencipta devisa, dan penambah kesempatan kerja sehingga BRIN terlibat dalam pengembangan varietas unggul tembakau.²⁰⁸ Direktur Jenderal Argo Kementerian Perindustrian mengunjungi perusahaan industri kertas sigaret PT Mitra Prodin, Bali, serta menyampaikan apresiasi telah menyerap tenaga kerja dan menghasilkan devisa negara atas ekspor produknya.^{209, 210} Wakil Menteri Investasi (BKPM), Andi Maulana, bersama sejumlah pejabat penting lainnya menghadiri upacara peletakan batu pertama pembangunan pabrik baru KT&G di Surabaya pada April 2024.²¹¹ Gubernur Lampung mengunjungi dan meninjau kebun tembakau dan unit pengelolaan hasil tembakau di Lampung Timur.^{212, 213} Gubernur Jawa Timur hadir dan memberikan apresiasi kepada PT HM Sampoerna atas kontribusinya terhadap perekonomian daerah di acara											

^{vii} Termasuk anggota keluarga inti dari para pejabat tinggi.

	0	1	2	3	4	5
peresmian fasilitas produksi sigaret kretek tangan (SKT) Mitra Produksi Sigaret (MPS) di Dander, Kabupaten Bojonegoro.²¹⁴⁻²¹⁶ Penjabat Gubernur Jawa Timur dan Deputy Kementerian Investasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) menghadiri <i>groundbreaking</i> pabrik pengolahan tembakau milik PT Tri Sakti Purwosari Makmur (TSPM/KT&G) di Kawasan Industri Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER).^{217, 218} Penjabat Bupati Kudus menyatakan bahwa pengembangan usaha rokok di Kudus melalui KIHT dan SIHT penting untuk mendukung kontribusi daerah terhadap APBN, sekaligus merapikan tata kelola dan meningkatkan produksi rokok rumahan.²¹⁹ Kasi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Kudus, Sandy Hendratmo Sopan, menyatakan bahwa KIHT dan SIHT hadir untuk mendukung pengusaha rokok kecil sekaligus menggempur peredaran rokok ilegal.²²⁰ Penjabat Bupati Garut mendukung dan akan mengeluarkan kebijakan terkait pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat mengatakan Kabupaten Garut menjadi salah satu daerah dengan produksi tembakau terbesar di Jawa Barat.²²¹ Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kabupaten Kudus mendukung peningkatan jumlah pabrik tokok di Kabupaten Kudus guna memenuhi target penerimaan cukai hasil tembakau.²²² Kepala Kantor Bea Cukai Purwokerto mendorong pengembangan industri hasil tembakau di Purbalingga.²²³ Kepala Dinas Perindustrian NTB mengunjungi Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) di Lombok Timur guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi rokok untuk menekan peredaran rokok ilegal.²²⁴ Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar memberikan apresiasi kepada industri tembakau karena telah membuka peluang kerja baru.²²⁵						
9. Pemerintah menerima bantuan atau tawaran bantuan dari industri tembakau dalam hal penegakan hukum, seperti melakukan razia terhadap penyelundupan produk tembakau, bantuan penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok, atau larangan penjualan kepada anak di bawah umur (termasuk kontribusi dalam bentuk dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut). (Rec 4.3)					4	
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) menghadiri Bedah Laporan Global ‘Lives Saved Report’ yang dirilis oleh Global Health Consults dan meyakini pendekatan <i>Tobacco Harm Reduction</i> (THR) bisa menjadi salah satu alternatif dalam upaya berhenti merokok.²²⁶⁻²²⁸ Meskipun ada potensi pernyataan Direktur PTM yang beredar di media adalah pernyataan yang dipelintir oleh penyelenggara acara dan disebarkan ke media, tetapi pemberitaan yang muncul serta kehadiran Direktur PTM dalam acara tersebut tetap menimbulkan kesan bahwa Kementerian Kesehatan mendukung THR di mata masyarakat.						
10. Pemerintah menerima, mendukung, menyetujui, atau menjalin kemitraan maupun kesepakatan <i>tidak mengikat</i> dengan industri tembakau <i>atau entitas lain yang bekerja untuk kepentingan industri tersebut</i>. (Rec 3.1) (Rekomendasi 3.1). <i>Catatan: Hal ini tidak mencakup kegiatan CSR, penegakan hukum, atau pengembangan kebijakan pengendalian tembakau karena sudah dibahas dalam pertanyaan sebelumnya.</i>						5
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian didampingi oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop dan UKM) menghadiri acara “Pesta Rakyat UMKM untuk Indonesia” yang diselenggarakan oleh PT HM Sampoerna bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN), mendorong kolaborasi antara pemerintah dan HM Sampoerna dalam menjalankan						

	0	1	2	3	4	5
program Kartu Prakerja dan mengapresiasi inisiatif Sampoerna melalui program Sampoerna Retail Community (SRC) dan Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC).^{229,230} Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan PT Suryo Dhoho Investama, anak usaha PT Gudang Garam, membangun Bandara Dhoho di Kediri.²³¹ Kementerian Pekerjaan Umum menjalin kerja sama untuk pengusahaan jalan tol Kediri-Tulungagung dengan PT Surya Septa Agung Tol, yang merupakan anak usaha PT Gudang Garam.²³² Bentoel Group menyelenggarakan Bangun Bangsa Conference, konferensi yang bertujuan untuk mendiskusikan solusi kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam berbagai isu keberlanjutan dan sosial, yang dihadiri oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian, Koordinator Program Usaha Aneka Energi Baru Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Sub Direktorat Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.^{233, 234} Anak perusahaan Grup Djarum, Polytron, tertarik dengan proyek pengembangan mobil nasional yang direncanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian.²³⁵ Menteri Investasi dan Hilirisasi (Kepala BKPM) memberikan dukungan terhadap dua pabrik Sigaret Kretek Tangan (SKT) milik Sampoerna.²³⁶ Perdagangan ilegal: Dalam upaya memberantas peredaran produk ilegal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bekerja sama dengan Sampoerna dalam proses identifikasi, autentikasi, dan investigasi terhadap produk tembakau ilegal, baik yang menyerupai produk Sampoerna maupun produk Sampoerna sendiri yang diselundupkan.²³⁷						
Indikator 5: Transparansi						
11. Pemerintah tidak secara terbuka mengungkapkan pertemuan/interaksi dengan industri tembakau bahkan dalam kasus di mana interaksi tersebut sangat diperlukan untuk keperluan pengaturan. (Rec 2.2)						5
Tidak ada mekanisme standar bagi pemerintah untuk secara terbuka mengungkapkan informasi mengenai pertemuan/interaksi dengan industri tembakau atau hasil dari interaksi tersebut.						
12. Pemerintah mewajibkan adanya aturan untuk pengungkapan atau pendaftaran entitas industri tembakau, organisasi yang terafiliasi, dan individu yang bertindak atas nama mereka, termasuk pelobi. (Rec 5.3)						5
Pemerintah Indonesia tidak memiliki kebijakan khusus yang mengharuskan industri tembakau untuk melaporkan atau mendaftarkan anggota atau lembaga yang terafiliasi dengan industri tembakau. Dalam interaksi formal, nama-nama peserta dalam setiap pertemuan dicatat dalam daftar hadir dan notulen pertemuan. Daftar hadir dan notulen tersebut tidak tersedia untuk umum.						
Indikator 6: Benturan Kepentingan						
13. Pemerintah tidak melarang sumbangan dari industri tembakau atau entitas lain yang bekerja untuk kepentingan industri tembakau kepada partai politik, kandidat, atau kampanye politik, maupun tidak mengharuskan pengungkapan penuh atas sumbangan tersebut. (Rec 4.11)						5
Pejabat pemerintah yang terlibat dalam kampanye partai politik wajib mengundurkan diri. Namun, tidak ada kebijakan yang melarang sumbangan dari berbagai sumber termasuk industri tembakau untuk kampanye politik. Perusahaan tembakau dikaitkan dengan pemilihan umum, tetapi tidak terdapat informasi rinci mengenai kontribusi politik yang diberikan. ²³⁸						

	0	1	2	3	4	5
14. Pejabat pemerintah yang telah pensiun menjadi bagian dari industri tembakau (mantan Perdana Menteri, Menteri, Jaksa Agung). (Rec 4.4)					4	
Tidak ditemukan kejadian baru pada dua tahun ke belakang, tetapi kejadian lama masih relevan: - Benny Wachjudi, Mantan Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian masih menjabat sebagai Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo).²³⁹ - Willem Petrus Riwu, Mantan Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar, Kementerian Perindustrian, masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI).²⁴⁰						
15. <u>Pejabat pemerintah aktif</u> dan kerabatnya memegang posisi dalam bisnis tembakau termasuk posisi konsultan. (Rec 4.5, 4.8, 4.10)		1				
Tidak ada pejabat pemerintah aktif yang bekerja di industri tembakau, termasuk posisi konsultan. Terdapat regulasi yang melarang pegawai negeri aktif bekerja di luar pemerintahan, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan. Namun, kami menemukan ada aparatur sipil negara yang masih aktif di BRIN,²⁴¹ yang sebelumnya BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional),²⁴² yang juga menjadi ketua di salah satu kelompok pendukung rokok elektronik, yaitu Asosiasi Konsumen Vape Indonesia atau AKVINDO.²⁴³						
Indikator 7: Upaya Pencegahan						
16. Pemerintah telah menetapkan prosedur untuk mengungkapkan catatan/rekaman interaksi (seperti agenda, daftar peserta, notulen, dan hasil) dengan industri tembakau dan perwakilannya. (Rec 5.1)						5
Tidak ada kebijakan khusus mengenai pencatatan interaksi dengan industri tembakau. Biasanya, rapat formal dicatat dalam bentuk notulen rapat; tidak ada perbedaan antara industri tembakau dan industri lainnya, industri tembakau dianggap sebagai industri normal dan diperlakukan sama dengan industri normal lainnya.						
17. Pemerintah telah merumuskan, mengadopsi, dan menerapkan kode etik untuk pejabat publik yang mengatur standar yang harus dipatuhi dalam berhubungan dengan industri tembakau. (Rec 4.2);			2			
Pemerintah Indonesia memiliki kode etik umum untuk semua pejabat publik dalam berinteraksi dengan pihak di luar pemerintahan, tetapi tidak secara khusus ditujukan untuk industri tembakau. Permen PAN & RB No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, adalah kode etik yang berlaku secara umum bagi pejabat dan aparatur negara dalam berinteraksi dengan semua lembaga atau perusahaan di luar sektor pemerintahan. Regulasi ini menjadi acuan bagi Kementerian Kesehatan untuk mengembangkan dan menerapkan regulasi yang secara khusus menjadi kode etik untuk menghindari benturan kepentingan dengan industri tembakau. Peraturan Menteri Kesehatan No. 50/2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dengan Industri Tembakau di Lingkungan Kementerian Kesehatan diperluas untuk mencakup ketentuan-ketentuan yang berlaku secara eksklusif bagi industri tembakau yang berbahaya. Saat ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga sedang menyusun aturan internal serupa.						
18. Pemerintah mewajibkan industri tembakau untuk secara berkala mengirimkan informasi tentang produksi tembakau, manufaktur, pangsa pasar, pengeluaran pemasaran, pendapatan, dan aktivitas lainnya, termasuk lobi, filantropi, kontribusi politik, <u>serta semua bentuk kegiatan</u>			2			

	0	1	2	3	4	5
iklan, promosi, dan sponsor tembakau, seperti tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan tanggung jawab produsen terhadap lingkungan (EPR) (COP10), serta entitas industri tembakau, organisasi yang berafiliasi, individu yang bertindak atas nama mereka, dan kelompok yang didanai industri tembakau berikut aktivitas penelitian dan pemasarannya. (Rec 5.2, 5.3, dan Keputusan COP9 dan COP10)						
Hanya beberapa lembaga pemerintah atau kementerian yang meminta industri tembakau untuk menyampaikan laporan, misalnya laporan terkait volume produksi kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk perhitungan cukai tahunan. Informasi lain seperti jumlah karyawan, luas lahan, produksi daun tembakau, impor, ekspor, pangsa pasar, dan lain-lain dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik. Tidak ada kewajiban untuk melaporkan kegiatan lain seperti pengeluaran iklan, promosi, sponsor, kegiatan lobi, serta kontribusi politik.						
19. Pemerintah memiliki program/sistem/rencana untuk secara konsisten ^{viii} meningkatkan kesadaran di dalam lembaga pemerintah atau kementerian mengenai kebijakan yang berkaitan dengan Pedoman Pasal 5.3 FCTC. (Rec I.1, I.2)						5
Meskipun akses WHO FCTC merupakan topik advokasi yang sering dirujuk, tetapi belum ada program di pemerintah yang secara konsisten membangun kesadaran tentang pasal-pasal WHO FCTC atau pedoman implementasinya.						
20. Pemerintah telah menetapkan kebijakan yang melarang penerimaan segala bentuk sumbangan/hadiah dari industri tembakau (baik dalam bentuk uang atau lainnya) termasuk tawaran bantuan, rancangan kebijakan, atau undangan kunjungan studi yang diberikan atau ditawarkan kepada pemerintah, lembaga pemerintah, pejabatnya, dan kerabatnya. (3.4)		2				
Hanya Kementerian Kesehatan yang memiliki kebijakan untuk mencegah pejabat dan aparatur sipil negara di wilayah administrasi Kementerian Kesehatan dari campur tangan industri tembakau. Peraturan Menteri Kesehatan No. 50/2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dengan Industri Tembakau di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1599) berlaku khusus untuk industri tembakau yang mempunyai karakteristik khusus dan merugikan kesehatan. Peraturan yang diundangkan pada tanggal 26 Oktober 2016 tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Menteri PAN dan RB No. 37 Tahun 2012 yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 17 Tahun 2024. Saat ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga sedang menyusun aturan internal serupa.						
TOTAL						78

Sebagai negara non-anggota WHO FCTC, pertanyaan 4 tidak berlaku untuk Indonesia. Sehingga jumlah skor 78 setelah disesuaikan dan dihitung kembali ($78 \div 95 \times 100$) skor akhirnya menjadi 82.

^{viii} Dalam konteks pertanyaan ini, "secara konsisten" berarti: a) Setiap kali FCTC dibahas, Pasal 5.3 juga dijelaskan; dan b) Setiap kali ada kesempatan, seperti saat ditemukan atau dilaporkan adanya campur tangan industri tembakau.

PERTANYAAN TAMBAHAN	
<i>Berdasarkan Keputusan COP9 dan COP10 yang menyoroti rekomendasi Pasal 5.3</i>	
A. TANGGUNG JAWAB HUKUM (LIABILITY): Pemerintah telah mengadopsi atau menegakkan sanksi wajib terhadap industri tembakau apabila terbukti memberikan informasi yang salah atau menyesatkan (Rekomendasi 5.4) [5.4 Para pihak sebaiknya menetapkan sanksi wajib terhadap industri tembakau apabila memberikan informasi yang salah atau menyesatkan, sesuai dengan hukum nasional.]	
Bukti	
Pemerintah tidak mengadopsi terkait tanggung jawab hukum (<i>liability</i>).	
B. BASIS DATA SUMBER DAYA PENGETAHUAN: Pemerintah telah mengadopsi dan melaksanakan langkah-langkah untuk memastikan akses publik terhadap informasi mengenai aktivitas industri tembakau [5.5 Para pihak sebaiknya mengadopsi dan melaksanakan langkah-langkah legislatif, eksekutif, administratif, dan langkah lain yang efektif untuk menjamin akses publik—sesuai dengan Pasal 12(c) dalam Konvensi—terhadap berbagai informasi mengenai aktivitas industri tembakau yang relevan dengan tujuan konvensi, misalnya melalui repositori publik.]	
Bukti	
Pemerintah tidak mengadopsi langkah-langkah untuk memastikan akses publik terhadap informasi kegiatan industri tembakau.	

REFERENSI

1. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. *Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Dalam Angka, Data Akurat Kebijakan Tepat*. Kementerian Kesehatan RI, 2023.
2. Reitsma MB, Kendrick PJ, Abbabneh E, Abbafati C, Abbasi-Kangevari M, Abdoli A, *et al*. Spatial, temporal, and demographic patterns in prevalence of smoking tobacco use and attributable disease burden in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2019. *The Lancet*. 2021;397(10292):2337–60.
3. Meilissa Y, Nugroho D, Luntungan NN, Dartanto T. The 2019 economic cost of smoking-attributable diseases in Indonesia. *Tobacco Control*. 2022;31(Suppl 2):s133–s9.
4. Siswanto D. *Lampau Target, Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Capai Rp 218 Triliun di 2022*. Kontan.co.id, 8 Januari 2023. [https://nasional.kontan.co.id/news/lampau-target-penerimaan-cukai-hasil-tembakau-capai-rp-218-triliun-di-2022#:~:text=%22Faktor%20pendorong%20tumbuhnya%20penerimaan%20CHT,mencapai%20Rp%20317%2C8%20triliun.&text=Realisasi%20tersebut%20telah%20melewati%20target,MMEA\)%20seiring%20membaiknya%20sektor%20pariwisata](https://nasional.kontan.co.id/news/lampau-target-penerimaan-cukai-hasil-tembakau-capai-rp-218-triliun-di-2022#:~:text=%22Faktor%20pendorong%20tumbuhnya%20penerimaan%20CHT,mencapai%20Rp%20317%2C8%20triliun.&text=Realisasi%20tersebut%20telah%20melewati%20target,MMEA)%20seiring%20membaiknya%20sektor%20pariwisata).
5. *Indonesia Cigarettes – Market Assessment and Forecasts to 2028*. GlobalData, December 2024. https://drive.google.com/file/d/1_Z4_-lKoTqM4033VnJXwRAWFySSOGd-g/view.
6. Sari HP, Ika A. *Menperin Keberatan Tembakau Disetarakan dengan Narkotika dalam RUU Kesehatan*. Kompas.com, 10 Mei 2023. <https://money.kompas.com/read/2023/05/10/140000926/menperin-keberatan-tembakau-disetarakan-dengan-narkotika-dalam-ruu-kesehatan>.
7. Muslimawati N. *Menperin Keberatan Rokok Disejajarkan dengan Narkotika di RUU Kesehatan*. kumparanBISNIS, 10 Mei 2023. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/menperin-keberatan-rokok-disejajarkan-dengan-narkotika-di-ruu-kesehatan-20NOzvENyzW/full>.
8. Islamiati W. *RUU Kesehatan, Kemenperin Tolak Tembakau Disetarakan Narkotika*. Bisnis.com, 12 Mei 2023. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230512/257/1655265/ruu-kesehatan-kemenperin-tolak-tembakau-disetarakan-narkotika>.
9. Putra DA. *DPR: Adiksi Narkotika Tidak Sama dengan Tembakau*. Tirto.id, 5 Mei 2023. <https://tirto.id/dpr-adiksi-narkotika-tidak-sama-dengan-tembakau-gFvy>.
10. Nordiansyah E. *Duh! Aturan Ini Bisa Bikin Penerimaan Negara dari IHT Tekor*. Medcom.id, 5 Mei 2023. <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/Wb7zX3rN-duh-aturan-ini-bisa-bikin-penerimaan-negara-dari-ih-t-tekor>.
11. Halim F. *Aturan Ini Dinilai Bisa Mematikan Industri Tembakau* VIVA.co.id, 6 Mei 2023. <https://www.viva.co.id/bisnis/1597840-aturan-ini-dinilai-bisa-mematikan-industri-tembakau>.
12. Setyaningrum PM. *DPR Minta Ketentuan Penyamarataan Tembakau dan Narkoba dalam RUU Kesehatan Dihapus*. Warta Ekonomi, 8 Mei 2023. <https://wartaekonomi.co.id/read497554/dpr-minta-ketentuan-penyamarataan-tembakau-dan-narkoba-dalam-ruu-kesehatan-dihapus>.
13. Suryowati E. *DPR Nilai Pasal 154 RUU Kesehatan Bisa Mengkriminalisasi Perokok hingga Petani Tembakau*. JawaPos.com, 8 Juni 2023. <https://www.jawapos.com/ekonomi/01767421/dpr-nilai-pasal-154-ruu-kesehatan-bisa-mengkriminalisasi-perokok-hingga-petani-tembakau>.
14. Naufal I. *Penyetaraan Tembakau dengan Narkotika Ancam Keadilan dan Stabilitas Sosial*. Inilah.com, 16 Juni 2023. <https://www.inilah.com/penyetaraan-tembakau-dengan-narkotika-ancam-keadilan-dan-stabilitas-sosial>.
15. Almas A. *Anggota DPR Usul Pengeluaran Aturan Tembakau dengan Narkotika dan Psikotropika di RUU Kesehatan*. Warta Ekonomi, 16 Juni 2023. <https://wartaekonomi.co.id/read504357/anggota-dpr-usul-pengeluaran-aturan-tembakau-dengan-narkotika-dan-psikotropika-di-ruu-kesehatan>.
16. Suyitno H. *DPRD Temanggung Apresiasi Petani Kawal Regulasi Menyangkut Tembakau*. Antara, 25 Juni 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3605637/dprd-temanggung-apresiasi-petani-kawal-regulasi-menyangkut-tembakau>.
17. Purnama ID. *Mahfud MD Bakal Tinjau Regulasi Tembakau: Harus Untungkan Petani*. SINDOnews.com, 11 Januari 2024. <https://ekbis.sindonews.com/read/1296363/34/mahfud-md-bakal-tinjau-regulasi-tembakau-harus-untungkan-petani-1704960096>.
18. Suryarandika R. *Mahfud Berjanji Kembalikan Kejayaan Garam dan Tembakau Madura*. Republika.co.id, 11 Januari 2024. <https://pemilukita.republika.co.id/berita/s7383c330/mahfud-janji-kembalikan-kejayaan-garam-dan-tembakau-madura>.
19. Firmansyah I. *RPP Kesehatan Diminta Tidak Abaikan Komoditas Tembakau Nasional Sebagai Perlindungan Masyarakat Adat*. Suara.com, 24 Januari 2024. <https://www.suara.com/pressrelease/2024/01/24/162500/rpp-kesehatan-diminta-tidak-abaikan-komoditas-tembakau-nasional-sebagai-perlindungan-masyarakat-adat>.
20. Winarno Y. *Mahfud MD Minta RPP Kesehatan Tidak Abaikan Komoditas Tembakau*. Kontan.co.id, 25 Januari 2024. <https://nasional.kontan.co.id/news/mahfud-md-minta-rpp-kesehatan-tidak-abaikan-komoditas-tembakau>.
21. pzsna. *DPR Diminta Tidak Terburu-Buru Menyetujui RPP Kesehatan yang Merugikan Pekerja Industri Tembakau*. IndoJPNN, 3 November 2023. <https://indojpnn.com/2024/07/08/dpr-diminta-tidak-terburu-buru-menyetujui-rpp-kesehatan-yang-merugikan-pekerja-industri-tembakau/>.
22. Winosa Y. *Kisruh DBHCHT dan RUU Tembakau, Misbakhun: Pemimpin Harus Bela Kepentingan Nasional*. Akurat.co, 4 Januari 2024. <https://www.akurat.co/makro/1303696316/kisruh-dbhcht-dan-ruu-tembakau-misbakhun-pemimpin-harus-bela-kepentingan-nasional>.
23. Setiawan SRD. *Industri Rokok Disebut Ditebani Kebijakan Restriktif*. Kompas.com, 9 Januari 2024. <https://money.kompas.com/read/2024/01/09/194600126/industri-rokok-disebut-ditebani-kebijakan-restriktif>.
24. Deny S. *Sumbang Triliunan Rupiah ke Negara, DPR Minta Tembakau Masuk di Debat Capres-Cawapres*. Liputan6.com, 9 Januari 2024. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5500949/sumbang-triliunan-rupiah-ke-negara-dpr-minta-tembakau-masuk-di-debat-capres-cawapres?page=5>.
25. Buana G. *DPR Minta Pemerintah Berhenti Abaikan Derasnya Penolakan RPP Kesehatan*. Media Indonesia, 9 Januari 2024. <https://mediaindonesia.com/humaniora/643047/dpr-minta-pemerintah-berhenti-abaikan-derasnya-penolakan-rpp-kesehatan>.
26. Hidayat AN. *DPR Minta Pemerintah Berhenti Abaikan Derasnya Penolakan Pasal-Pasal Tembakau di RPP Kesehatan*. Warta Ekonomi, 9 Januari 2024. <https://wartaekonomi.co.id/read525304/dpr-minta-pemerintah-berhenti-abaikan-derasnya-penolakan-pasal-pasal-tembakau-di-rpp-kesehatan>.
27. Khoirunnisa J. *RPP Kesehatan Ancam Industri Rokok, DPR Minta Pemerintah Buka Ruang Dialog*. detikFinance, 29 Februari 2024. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7213748/rpp-kesehatan-ancam-industri-rokok-dpr-minta-pemerintah-buka-ruang-dialog>.

28. Fadilah I. *Anak Buah Bahlil Respons Aturan Pengetatan Rokok, Soroti Nasib Industri-Tenaga Kerja*. detikFinance, 25 Januari 2024. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7159475/anak-buah-bahlil-respons-aturan-pengetatan-rokok-soroti-nasib-industri-tenaga-kerja>.
29. Widiarini AD, Noviyanti S. *Punya Kontribusi Besar, Ini Potensi Kerugian Jika Pasal Tembakau pada RPP Kesehatan Disahkan*. Kompas.com, 18 Januari 2024. <https://money.kompas.com/read/2024/01/18/145146526/punya-kontribusi-besar-ini-potensi-kerugian-jika-pasal-tembakau-pada-rpp?page=1>.
30. Irawan W. *DPRD Jatim Terima Masukan Pelaku Industri Tentang RPP Kesehatan*. Antara News, 19 Mei 2024. <https://jatim.antaranews.com/berita/788106/dprd-jatim-terima-masukan-pelaku-industri-tentang-rpp-kesehatan>.
31. Masduki A. *Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah Sebut Pasal Tembakau Harusnya Dipisah dari RPP Kesehatan*. iNewsSurabaya.id, 19 Mei 2024. <https://surabaya.inews.id/read/445266/wakil-ketua-dprd-jatim-anik-maslachah-sebut-pasal-tembakau-harusnya-dipisah-dari-rpp-kesehatan>.
32. Yuana L. *Petani Tembakau Tak Berdaya Hadapi RPP Kesehatan, Ini yang Dilakukan Wakil Ketua DPRD Jatim*. Times Surabaya, 19 Mei 2024. <https://surabaya.times.co.id/news/berita/115314tux/Petani-Tembakau-Tak-Berdaya-Hadapi-RPP-Kesehatan-Ini-yang-Dilakukan-Wakil-Ketua-DPRD-Jatim>.
33. Arifin C. *RPP Kesehatan Jadi Tantangan, Pemerintah Diminta Dukung Kesejahteraan Petani Tembakau*. Tribunnews.com, 15 Mei 2024. <https://www.tribunnews.com/bisnis/2024/05/15/rpp-kesehatan-jadi-tantangan-pemerintah-diminta-dukung-kesejahteraan-petani-tembakau>.
34. Ginastiar A. *RPP Kesehatan hingga Cukai Rokok, Pemerintah Diminta Ingat Nasib Petani Tembakau*. Warta Ekonomi, 15 Mei 2024. <https://wartaekonomi.co.id/read535137/rpp-kesehatan-hingga-cukai-rokok-pemerintah-diminta-ingat-nasib-petani-tembakau>.
35. Guritno T, Prabowo D. *Peraturan Jokowi Soal Larangan Jual Rokok Eceran Dianggap Mematikan Pedagang Asongan*. Kompas.com, 1 Agustus 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/01/23004911/peraturan-jokowi-soal-larangan-jual-rokok-eceran-dianggap-mematikan-pedagang>.
36. Aulia S. *Pemerintah Larang Jual Rokok Ketengan, DPR: Jangan Bikin Rakyat Kecil Tambah Susah*. tvonenews.com, 2 Agustus 2024. https://www.tvonenews.com/ekonomi/232917-pemerintah-larang-jual-rokok-ketengan-dpr-jangan-bikin-rakyat-kecil-tambah-susah#google_vignette.
37. Hafiez FA. *DPR Kritik Larangan Jual Rokok Eceran, Dianggap Tak Memihak Wong Cilik* 1 Agustus 2024. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/689388/dpr-kritik-larangan-jual-rokok-eceran-dianggap-tak-memihak-wong-cilik>.
38. Firdaus I. *Pemerintah Larang Jual Rokok Ketengan, Anggota Komisi VI DPR: Tak Berpihak ke Wong Cilik!* Kompas.tv, 1 Agustus 2024. <https://origin.kompas.tv/nasional/527645/pemerintah-larang-jual-rokok-ketengan-anggota-komisi-vi-dpr-tak-berpihak-ke-wong-cilik>.
39. Hadi F. *Politikus PKB Soroti Larangan Jual Rokok Eceran: Tidak Adil Bagi Pedagang Kecil*. KumparanNEWS, 1 Agustus 2024. <https://kumparan.com/kumparannews/politikus-pkb-soroti-larangan-jual-rokok-eceran-tidak-adil-bagi-pedagang-kecil-23Exmk8mmyQ>.
40. Triatmojo D. *Komisi IX DPR Kritik Kemenkes, Pembentukan PP 28/2024 Dinilai Minim Pelibatan Publik*. Tribunnews.com, 5 September 2024. <https://www.tribunnews.com/nasional/2024/09/05/komisi-ix-dpr-kritik-kemenkes-pembentukan-pp-282024-dinilai-minim-pelibatan-publik>.
41. Aditiya S. *DPR Murka tak Dilibatkan Kemenkes dalam Menyusun PP Kesehatan Mengenai Produk Tembakau*. VIVA.co.id, 5 September 2024. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1749012-dpr-murka-tak-dilibatkan-kemenkes-dalam-menyusun-pp-kesehatan-mengenai-produk-tembakau>.
42. Triatmojo D. *Banyak Dikritisi, Baleg DPR Akan Ambil Langkah Pastikan Rancangan Permenkes Sesuai UU*. Tribunnews.com, 18 September 2024. <https://www.tribunnews.com/nasional/2024/09/18/banyak-dikritisi-baleg-dpr-akan-ambil-langkah-pastikan-rancangan-permenkes-sesuai-uu>.
43. Darmayana H. *Soal RPMK Tembakau, Abidin Ingatkan Kemenkes Tak Timbulkan Kegaduhan*. Independensi, 24 September 2024. <http://independensi.com/2024/09/24/soal-rpmk-tembakau-abidin-ingatkan-kemenkes-tak-timbulkan-kegaduhan/>.
44. Zulfikar M. *Polemik Rancangan Permenkes Kemasan Rokok Seragam, DPR: Semua Pihak Harus Duduk Bersama*. Tribunnews.com, 12 November 2024. <https://www.tribunnews.com/nasional/2024/11/12/polemik-rancangan-permenkes-kemasan-rokok-seragam-dpr-semua-pihak-harus-duduk-bersama>.
45. Martaon AT. *Semua Pihak Diminta Duduk Bersama Lindungi Pekerja dan Petani Tembakau*. Metrotvnews.com, 12 November 2024. <https://www.metrotvnews.com/read/KvJCaGX1-semua-pihak-diminta-duduk-bersama-lindungi-pekerja-dan-petani-tembakau>.
46. Kusuma F. *DPR RI Ingatkan Pemerintah Pertimbangkan Dampak Hulu-Hilir RPMK Industri Hasil Tembakau*. SuaraSurabaya.net, 18 September 2024. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/dpr-ri-ingatkan-pemerintah-pertimbangkan-dampak-hulu-hilir-rpmk-industri-hasil-tembakau/>.
47. Supriyatna H. *Tak Dilibatkan, Kemnaker Soroti R-Permenkes Produk Tembakau yang Berpotensi Tingkatkan Pengangguran*. Akurat.co, 14 November 2024. <https://www.akurat.co/rill/1305312292/tak-dilibatkan-kemnaker-soroti-r-permenkes-produk-tembakau-yang-berpotensi-tingkatkan-pengangguran>.
48. Nordiansyah E. *Aturan Terkait Produk Tembakau Diminta Libatkan Semua Pihak*. Medcom.id, 14 November 2024. <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/1bVry5Qb-aturan-terkait-produk-tembakau-diminta-libatkan-semua-pihak>.
49. Abdulah ATB. *Kemnaker Peringatkan R-Permenkes Produk Tembakau Berpotensi Tambah Angka Pengangguran*. Tribunnews.com, 14 November 2024. <https://www.tribunnews.com/nasional/2024/11/14/kemnaker-peringatan-r-permenkes-produk-tembakau-berpotensi-tambah-angka-pengangguran>.
50. Zubaidi Z. *DPRD Jatim Minta Evaluasi RPMK Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik*. Jatimnow.com, 13 Oktober 2024. <https://jatimnow.com/baca-72400-dprd-jatim-minta-evaluasi-rpmk-pengamanan-produk-tembakau-dan-rokok-elektronik>.
51. Ferdiansyah B. *Baleg: Kemasan rokok polos rugikan industri hasil tembakau*. Antara, 24 September 2024. <https://sumbar.antaranews.com/berita/632547/baleg-kemasan-rokok-polos-rugikan-industri-hasil-tembakau>.
52. Hidayat F. *Dinilai Tidak Transparan, DPR Sorot Draft Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Usulan Kemenkes*. Warta Ekonomi, 17 September 2024. <https://wartaekonomi.co.id/read544634/dinilai-tidak-transparan-dpr-sorot-draft-aturan-kemasan-rokok-polos-tanpa-merek-usulan-kemenkes>.
53. Sanusi. *Dinilai Tidak Transparan, DPR Sorot Draft Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek*. Tribunnews.com, 17 September 2024. <https://www.tribunnews.com/bisnis/2024/09/17/dinilai-tidak-transparan-dpr-sorot-draft-aturan-kemasan-rokok-polos-tanpa-merek>.
54. Aco H. *DPR Desak Kemenkes Tinjau Ulang PP 28/2024 dan RPMK soal Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek*. Tribunnews.com, 18 September 2024. <https://www.tribunnews.com/nasional/2024/09/18/dpr-desak-kemenkes-tinjau-ulang-pp-282024-dan-rpmk-soal-kemasan-rokok-polos-tanpa-merek>.

55. Nugraha B, Prasetya MY. *Berdampak ke Industri, DPR Sebut Aturan Kemasan Rokok Polos Rugikan Sektor Tembakau*. VIVA.co.id, 16 September 2024. <https://www.viva.co.id/bisnis/1752327-berdampak-ke-industri-dpr-sebut-aturan-kemasan-rokok-polos-rugikan-sektor-tembakau>.
56. Suhartadi I. *Anggota DPR Menilai Kemasan Polos Tanpa Merek Tak Akan Kurangi Konsumsi Rokok*. Investor.id, 9 September 2024. <https://investor.id/business/372936/anggota-dpr-menilai-kemasan-polos-tanpa-merek-tak-akan-kurangi-konsumsi-rokok>.
57. Aditiya S, Al-Yamani Z. *DPR Kritik Keras Kebijakan Kemasan Rokok Polos: Bikin Rokok Illegal Merajalela*. VIVA.co.id, 10 September 2024. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1750444-dpr-kritik-keras-kebijakan-kemasan-rokok-polos-bikin-rokok-legal-merajalela>.
58. Suryowati E. *DPR Tegaskan Rancangan Permenkes Penyeragaman Kemasan Rokok Berpotensi Suburkan Rokok Illegal*. JawaPos.com, 17 Januari 2025. <https://www.jawapos.com/bisnis/015537120/dpr-tegaskan-rancangan-permenkes-penyeragaman-kemasan-rokok-berpotensi-suburkan-rokok-legal>.
59. Triatmojo D. *Komis XI DPR Soroti Potensi Suburnya Rokok Illegal Jika Regulasi Penyeragaman Kemasan Diterapkan*. Tribunnews.com, 20 Januari 2025. <https://www.tribunnews.com/bisnis/2025/01/20/komis-xi-dpr-soroti-potensi-suburnya-rokok-legal-jika-regulasi-penyeragaman-kemasan-diterapkan>.
60. Desfika TS. *Pengaturan Terlalu Ketat Berpotensi Hambat IHT*. Investor.id, 10 Desember 2024. <https://investor.id/business/382957/pengaturan-terlalu-ketat-berpotensi-hambat-ihf>.
61. Supriadi Y. *Industri Tembakau Terancam, Kemenko Perekonomian dan DPR Desak Kemenkes Revisi Permenkes*. Pikiran Rakyat, 10 Desember 2024. <https://deskjabar.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1138863010/industri-tembakau-terancam-kemenko-perekonomian-dan-dpr-desak-kemenkes-revisi-permenkes>.
62. Deny S. *Penyeragaman Kemasan Rokok Bisa Hambat Ekonomi*. Liputan6.com, 10 Desember 2024. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5828271/penyeragaman-kemasan-rokok-bisa-hambat-ekonomi?page=2>.
63. Khairunnisa B. *Aturan Rokok Kemasan Polos Bakal Diperketat, Kemenperin dan Ekonom Ungkap Bahayanya*. Disway.id, 24 September 2024. <https://disway.id/read/823593/aturan-rokok-kemasan-polos-bakal-diperketat-kemenperin-dan-ekonom-ungkap-bahayanya>.
64. Ferdiansyah B. *Perlu Penelitian Lebih Lanjut Soal Wacana Aturan Kemasan Rokok Polos*. Antara News, 20 September 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4347239/perlu-penelitian-lebih-lanjut-soal-wacana-aturan-kemasan-rokok-polos>.
65. Nurhidayat D. *Kemendag Belum Dilibatkan dalam Perumusan Kebijakan Kemasan Rokok Polos*. Metrotvnews.com, 20 September 2024. <https://www.metrotvnews.com/read/KELCxdw6-kemendag-belum-dilibatkan-dalam-perumusan-kebijakan-kemasan-rokok-polos>.
66. Purwanti T. *Kemendag Nilai Kebijakan Kemasan Rokok Polos Tidak Cocok untuk RI*. CNBC Indonesia, 20 September 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240920113701-4-573285/kemendag-nilai-kebijakan-kemasan-rokok-polos-tidak-cocok-untuk-ri>.
67. Miftahudin H. *Kementan: Rancangan Permenkes Bikin Pertanian Nasional Seret*. Metrotvnews.com, 23 Oktober 2024. <https://www.metrotvnews.com/read/NOICnpap-kementan-rancangan-permenkes-bikin-pertanian-nasional-seret>.
68. Fauzi A. *Kementan Nilai Kebijakan Rokok Baru Bisa Ganggu Sektor Pertanian*. Suara.Com, 23 Oktober 2024. <https://www.suara.com/bisnis/2024/10/23/175440/kementan-nilai-kebijakan-rokok-baru-bisa-ganggu-sektor-pertanian>.
69. Subekti R. *Bea Cukai Khawatir Penerapan Kemasan Rokok Polos Bisa Persulit Pengawasan*. Katadata.co.id, 23 September 2024. <https://katadata.co.id/finansial/makro/66f1ca9a00ac7/bea-cukai-khawatir-penerapan-kemasan-rokok-polos-bisa-persulit-pengawasan>.
70. Syafriadi A. *Dirjen Bea Cukai Akui Plain Packaging Bakal Sulitkan Pengawasan*. Akurat.co, 23 September 2024. <https://www.akurat.co/makro/1305120084/dirjen-bea-cukai-akui-plain-packaging-bakal-sulitkan-pengawasan>.
71. Anwar MC. *Pembahasan Aturan Kawasan Tanpa Rokok di Jatim Tuai Kritik dari Internal DPRD*. Jatim Times, 23 Maret 2024. <https://surabaya.jatimtimes.com/baca/308624/20240322/064000/pembahasan-aturan-kawasan-tanpa-rokok-di-jatim-tuai-kritik-dari-internal-dprd>.
72. Zaki A. *Raperda KTR, Anggota DPRD Jatim Minta Tidak Matikan Ekonomi*. Portaltiga.com, 22 Maret 2024. <https://portaltiga.com/baca-13949-raperd-ktr-anggota-dprd-jatim-minta-tidak-matikan-ekonomi>.
73. Dani R. *Bapemperda DPRD Kota Balikpapan Lakukan Pendalaman Raperda KSTR*. Inibalikpapan.com, 21 Mei 2024. <https://www.inibalikpapan.com/bapemperda-dprd-kota-balikpapan-lakukan-pendalaman-raperda-kstr/>.
74. Fatmawati. *DPRD Balikpapan Ingatkan Konsekuensi Penerapan Perda Anti Rokok*. IDN Times, 21 Mei 2024. <https://kaltim.idntimes.com/news/kaltim/fatmawati-8/dprd-balikpapan-ingatkan-konsekuensi-penerapan-perda-anti-rokok>.
75. Sutarni. *DPRD Kulon Progo Meminta Pemkab "Review" Perda KTR*. Antara, 24 Juli 2024. <https://jogja.antaranews.com/berita/703739/dprd-kulon-progo-meminta-pemkab-review-perda-ktr>.
76. Sutarni. *Perlunya Review Perda KTR untuk Tingkatkan Retribusi Iklan*. Antara, 28 Februari 2025. <https://jogja.antaranews.com/berita/735365/perlunya-review-perda-ktr-untuk-tingkatkan-retribusi-iklan>.
77. Jri. *Terkait Perda KTR, Pemprov Riau Minta Pemko Pekanbaru Kedepankan Objektivitas*. Iniriau.com, 6 September 2024. <https://www.iniriau.com/detail/43649/terkait-perda-ktr-pemprov-riau-minta-pemko-pekanbaru-kedepankan-objektivitas>.
78. Yul. *Agus Dono Wibawanto Minta Raperda Pertembakauan Lindungi Petani*. Beritalima.com, 8 April 2024. <https://beritalima.com/agus-dono-wibawanto-minta-raperda-pertembakauan-lindungi-petani/>.
79. Hany ADK. *May Day 2024: Ribuan Buruh Unjuk Rasa di Depan Graha Surabaya*. Radar Tuban, 2 Mei 2024. <https://radartuban.jawapos.com/daerah/864605118/unjuk-rasa-buruh-dipusatkan-di-surabaya>.
80. *Ikuti Aksi Mei Day 2024, Ini Lima Tuntutan Buruh Rokok Jatim*. Kabarbisnis.com, 3 Mei 2024. <https://kabarbisnis.com/read/28124254/ikuti-aksi-mei-day-2024-ini-lima-tuntutan-buruh-rokok-jatim>.
81. Susanto VY. *Pembentukan RUU Komoditas Strategis Harus Dibarengi Pembangunan Ekosistem Industri*. Kontan.co.id, 8 November 2024. <https://nasional.kontan.co.id/news/pembentukan-ruu-komoditas-strategis-harus-dibarengi-pembangunan-ekosistem-industri>.
82. Supriyatna I, Velrahga KD. *APHRF 2024, Pentingnya Inovasi dalam Pengurangan Bahaya Tembakau di Indonesia*. Suara.com, 4 Juli 2024. <https://www.suara.com/bisnis/2024/07/04/114726/aphrf-2024-pentingnya-inovasi-dalam-pengurangan-bahaya-tembakau-di-indonesia>.
83. Prambadi GA. *Asia Pacific Harm Reduction Forum 2024 Singgung Inovasi dalam Pengurangan Bahaya Tembakau*. Republika.co.id, 4 Juli 2024. <https://republika.co.id/berita/sg3ipn456/asia-pacific-harm-reduction-forum-2024-singgung-inovasi-dalam-pengurangan-bahaya-tembakau>.
84. Bigwanto M, Sundari L, Kowi U, Tantra R, Maruf MA. *Pelemahan Regulasi Kesehatan di Indonesia: Studi Kasus Pasal Pengamanan Zat Adiktif dalam UU dan RPP tentang Kesehatan*. Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) & Yayasan Lentera Anak, 2025:[40 (Tabel 13) p.]. <https://rukki.org/pelemahan-regulasi-kesehatan-di-indonesia-studi-kasus-pasal-pengamanan-zat-adiktif-uu-dan-rpp-kesehatan/>

85. Nur MF. *Panja RUU Kesehatan Klaim Akomodasi Kepentingan Banyak Pihak*. Tirta.id, 20 Juni 2023. <https://tirta.id/panja-ruu-kesehatan-klaim-akomodasi-kepentingan-banyak-pihak-gMc3?>
86. *Laporan Pertemuan dengan Wakil Japanese Tobacco Internasional (JTI) tentang Notifikasi TBT Taiwan terkait Peraturan Pencegahan Bahaya Tembakau Pada HS 24 (Tobacco and Manufactured Tobacco substitutes)*. Peraturan Tetap Republik Indonesia Jenewa, 3 Oktober 2024. https://drive.google.com/drive/folders/1HL1u_rdKWooO44AwhqmP79xWM71KhR-v.
87. Santoso B, Hutasuht YAA. *Ketemu Petani Tembakau Di Jombang, Kampanye Ganjar Banjir Keluhan*. Suara.com, 13 Januari 2024. <https://www.suara.com/kotaksuara/2024/01/13/235112/ketemu-petani-tembakau-di-jombang-kampanye-ganjar-banjir-keluhan>.
88. Yusuf M. *Temui Buruh Pelinting Tembakau di Kendal, Ganjar Beri Pesan Penting Jelang Pilpres 2024*. SINDOnews.com, 17 Januari 2024. <https://nasional.sindonews.com/read/1300465/12/temui-buruh-pelinting-tembakau-di-kendal-ganjar-beri-pesan-penting-jelang-pilpres-2024-1705464095>.
89. Rozie F. *Ganjar Sambangi Pabrik Tembakau di Kendal: Mudah-mudahan Ekonomi Dunia Membaik*. Liputan6.com, 17 Januari 2024. <https://www.liputan6.com/pemilu/read/5507193/ganjar-sambangi-pabrik-tembakau-di-kendal-mudah-mudahan-ekonomi-dunia-membaik?page=2>.
90. Fadilah K. *Ganjar Puji Pabrik Tembakau di Kendal yang Berdayakan Perempuan-Disabilitas*. detikNews, 17 Januari 2024. <https://news.detik.com/pemilu/d-7146079/ganjar-puji-pabrik-tembakau-di-kendal-yang-berdayakan-perempuan-disabilitas>.
91. Hafiez FA. *Tampung Aspirasi Petani Tembakau, Anies-Muhaimin Ingin Komoditas Lebih Dikenal Dunia*. Medcom.id, 10 Februari 2024. <https://www.medcom.id/pemilu/news-pemilu/zNAQQ1wN-tampung-aspirasi-petani-tembakau-anies-muhaimin-ingin-komoditas-lebih-dikenal-dunia>.
92. Adikara B. *TKN Prabowo-Gibran Sebut Kebijakan Jalan Tengah Ekosistem Tembakau Nasional akan Diakomodir*. JawaPos.com, 16 Februari 2024. <https://www.jawapos.com/politik/014168302/tkn-prabowo-gibran-sebut-kebijakan-jalan-tengah-ekosistem-tembakau-nasional-akan-diakomodir>.
93. *Prabowo-Gibran akan Akomodir Kebijakan Jalan Tengah Ekosistem Tembakau Nasional*. Liputan6.com, 17 Februari 2024. <https://www.liputan6.com/pemilu/read/5530012/prabowo-gibran-akan-akomodir-kebijakan-jalan-tengah-ekosistem-tembakau-nasional?page=2>.
94. Putra DA. *Klaim Boy Thohir & Efek Dukungan Terbuka Pengusaha ke Capres*. Tirta.id, 25 Januari 2024. https://tirta.id/klaim-boy-thohir-efek-dukungan-terbuka-pengusaha-ke-capres-qUUV#google_vignette.
95. Ameliya TM. *Anggota DPR Usul Dana Makan Bergizi Gratis Diambil dari Cukai Rokok*. Antara, 17 Januari 2025. <https://m.antaranews.com/amp/berita/4589906/anggota-dpr-usul-dana-makan-bergizi-gratis-diambil-dari-cukai-rokok>.
96. *Id. Irma NasDem Usul Dana Makan Bergizi Gratis Diambil dari Cukai Rokok*. CNN Indonesia, 17 Januari 2025. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250117115736-32-1188271/irma-nasdem-usul-dana-makan-bergizi-gratis-diambil-dari-cukai-rokok>.
97. Gozal RP. *Terapkan Prinsip TJSL, Nojorono Kudus Rengkuh CSR Award dari Pemprov Jateng*. Kontan.co.id, 18 Maret 2025. <https://native.kontan.co.id/news/terapkan-prinsip-tjsl-nojorono-kudus-rengkuh-csr-award-dari-pemprov-jateng?utm>.
98. Rosi A. *Pj Bupati Bondowoso Kawal Penyaluran Bantuan Beras kepada Warga Kurang Mampu*. Jatim Times, 19 Maret 2024. <https://jatimtimes.com/baca/308312/20240318/054300/pj-bupati-bondowoso-kawal-penyalaran-bantuan-beras-kepada-warga-kurang-mampu>.
99. Pangistu A, Gumilang. *Disaksikan Pj Bupati Bondowoso, Pengusaha Ini Salurkan Bantuan Beras bagi Ribuan Warga*. Ketik.co.id, 18 Maret 2024. <https://ketik.co.id/berita/disaksikan-pj-bupati-bondowoso-pengusaha-ini-salurkan-bantuan-beras-bagi-ribuan-warga>.
100. Sayekti IMS. *Pemkab Kudus Apresiasi Nojorono Kudus atas Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan*. Kontan.co.id, 29 Januari 2024. <https://pressrelease.kontan.co.id/news/pemkab-kudus-apresiasi-nojorono-kudus-atas-upaya-peningkatan-kualitas-lingkungan>.
101. Mahmudan. *Bupati Malang Minta Pabrik Rokok Dana Sekolah*. Radar Malang, 5 Juli 2024. <https://radarmalang.jawapos.com/pendidikan/814829893/bupati-malang-minta-pabrik-rokok-dana-sekolahan>.
102. *Hasil Kerja Sama CSR, 100 Rumah Sederhana Layak Huni Diserahkan*. Kuduskab.go.id, 12 Desember 2024. <https://ppid.kuduskab.go.id/post/1107/hasil-kerja-sama-csr--100-rumah-sederhana-layak-huni-diserahkan-?utm>.
103. *Kudus ASIK: Inisiasi Djarum Foundation demi Kudus Apik dan Resik*. Djarumfoundation.org, 26 Februari 2025. <https://www.djarumfoundation.org/aktivitas/kudus-asik-inisiasi-djarum-foundation-demi-kudus-apik-dan-resik?utm=>.
104. Nazaruddin A. *Koleksi Museum Kretek Kudus bertambah*. Antara News, 27 Maret 2024. <https://jateng.antaranews.com/berita/528462/koleksi-museum-kretek-kudus-bertambah>.
105. Masum S. *Menjajal Alat Produksi Rokok Tradisional di Museum Kretek, Dipakai Pabrikan Ternama di Indonesia*. TribunJateng.com, 26 Maret 2024. <https://jateng.tribunnews.com/2024/03/26/menjajal-alat-produksi-rokok-tradisional-di-museum-kretek-dipakai-pabrikan-ternama-di-indonesia>.
106. Hijrah N. *Pemkab Gowa Kembali Jalin Kerja Sama dengan Putera Sampoerna Foundation di Bidang Pendidikan*. Gowakab.go.id, 3 Februari 2025. <https://humas.gowakab.go.id/pemkab-gowa-kembali-jalin-kerjasama-dengan-putera-sampoerna-foundation-di-bidang-pendidikan/>.
107. *Putra Sampoerna Foundation Jalin Kerja Sama dengan Pemko Padang*. Instagram @disdikbud_padang, 18 Februari 2025. https://www.instagram.com/p/DGN2MHZy_BT/?utm_source=ig_web_copy_link.
108. Sumarno H. *Bupati Sabar AS, tanda tangani MOU dengan Yayasan Putera Sampoerna*. Antara, 24 Juli 2024. <https://sumbar.antaranews.com/berita/621291/bupati-sabar-as-tanda-tangani-mou-dengan-yayasan-putera-sampoerna>.
109. *Pemerintah Kota Solok dan Putera Sampoerna Foundation Resmikan Program Pendidikan untuk Siswa dan Guru di Kota Solok*. Psf outreach.com, 11 September 2024. <https://psf outreach.com/pemerintah-kota-solok-dan-putera-sampoerna-foundation-resmikan-program-pendidikan-untuk-siswa-dan-guru-di-kota-solok/>.
110. Maria E. *Tingkatkan Produktivitas Hasil Panen Tembakau, Pemkab Pasuruan Bermitra Dengan PT. HM Sampoerna Tbk*. Surabaya. Pasuruankab.go.id, 28 Desember 2023. <https://www.pasuruankab.go.id/index.php/isiberita/tingkatkan-produktivitas-hasil-panen-tembakau-pemkab-pasuruan-bermitra-dengan-pt-hm-sampoerna-tbk-surabaya#:~:text=Didampingi%20oleh%20Sekretaris%20Daerah%2C%20Yudha%20Triwidya%20Sasongko,PT.%20HM%20Sampoerna%20dalam%20rangka%20pendirian%20laboratorium>.
111. *A holistic approach to water stewardship at our Sukorejo plant in Indonesia*. Philip Morris International, 4 April 2023. <https://www.pmi.com/sustainability/case-studies-and-market-stories/water-stewardship-at-sukorejo-plant-in-indonesia>.
112. Nugroho RA. *Cukai Rokok Naik di 2025, Harga Marlboro-Sampoerna Kian Mahal*. CNBC Indonesia, 20 Juni 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240620082517-4-547691/cukai-rokok-naik-di-2025-harga-marlboro-sampoerna-kian-mahal>.
113. Sh I. *Tarif Cukai Rokok Tinggi, Anggota DPR Usulkan Ada Klasifikasi untuk Produk UMKM*. Kompas.com, 28 Mei 2024. https://nasional.kompas.com/read/2024/05/28/19452541/tarif-cukai-rokok-tinggi-anggota-dpr-usulkan-ada-klasifikasi-untuk-produk#google_vignette.

114. Denny S. *Rokok Illegal Makin Marak, Kenaikan Cukai 2025 Harus Dikaji Ulang*. Liputan6.com, 2 April 2024. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5565012/rokok-ilegal-makin-marak-kenaikan-cukai-2025-harus-dikaji-ulang?page=2>.
115. Djumena RRRE. *Soal Kenaikan Tarif Cukai, Pelaku Usaha Keluhkan Rokok Illegal*. Kompas.com, 3 April 2024. <https://money.kompas.com/read/2024/04/03/180900126/soal-kenaikan-tarif-cukai-pelaku-usaha-keluhkan-rokok-ilegal>.
116. Kristianus A. *Kenaikan Tarif Cukai Rokok Harus Pertimbangkan Daya Beli Masyarakat*. Beritasatu.com, 11 Juni 2024. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/2822010/kenaikan-tarif-cukai-rokok-harus-pertimbangkan-daya-beli-masyarakat>.
117. Siswanto D. *Soal Kenaikan Tarif Cukai Rokok, DPR akan Pertimbangkan Daya Beli Masyarakat*. Kontan.co.id, 11 Juni 2024. <https://nasional.kontan.co.id/news/soal-kenaikan-tarif-cukai-rokok-dpr-akan-pertimbangkan-daya-beli-masyarakat>.
118. Purwanto I. *Awas PHK Besar-besaran, DPR Ingatkan Sri Mulyani Pikir Matang Sebelum Naikkan Pajak*. Inilahjateng.com, 30 Januari 2024. <https://inilahjateng.com/awas-phk-besar-besaran-dpr-ingatkan-sri-mulyani-pikir-matang-sebelum-naikkan-pajak/>.
119. Siswo H. *Rencana Kenaikan Cukai Rokok, Ketua DPD RI Beri Solusi Agar IHT Tidak Terimbas*. Harian Rakyat, 12 Juni 2024. <https://harianrakyat.com/nasional/read/5328/Rencana-Kenaikan-Cukai-Rokok-Ketua-DPD-RI-Beri-Solusi-Agar-IHT-Tidak-Terimbas>.
120. Yefriza M. *Rencana Kenaikan Cukai Rokok, Ketua DPD RI Beri Solusi Agar IHT Tidak Terimbas*. Tagar.id, 12 Juni 2024. <https://www.tagar.id/rencana-kenaikan-cukai-rokok-ketua-dpd-ri-beri-solusi-agar-ih-tidak-terimbas>.
121. Ramdhini L. *Penerimaan Negara Tergerus, Stafsus Menkeu: Cukai Rokok 2025 Tak Bisa Naik Tinggi*. Trenasia, 27 Februari 2024. <https://www.trenasia.com/penerimaan-negara-tergerus-stafsus-menkeu-cukai-rokok-2025-tak-bisa-naik-tinggi>.
122. Nurdifa AR. *Rokok Illegal Marak, Kenaikan Cukai Tembakau Tiap Tahun Tak Efektif*. Bisnis.com, 28 Februari 2024. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240228/257/1744861/rokok-ilegal-marak-kenaikan-cukai-tembakau-tiap-tahun-tak-efektif>.
123. Fahlevi F. *Cegah Penerimaan Negara Tergerus, Pemerintah Diminta Hati-Hati Tetapkan Cukai Rokok 2025*. Tribunnews.com, 29 Februari 2024. <https://www.tribunnews.com/nasional/2024/02/29/cegah-penerimaan-negara-tergerus-pemerintah-diminta-hati-hati-tetapkan-cukai-rokok-2025>.
124. Prasetyo B. *Daniel Rohi Tolak Kenaikan Cukai Rokok SKT Pada 2025*. Rmoljatim.id, 16 Mei 2024. <https://www.rmoljatim.id/2024/05/16/daniel-rohi-tolak-kenaikan-cukai-rokok-skt-pada-2025>.
125. Akbar RJ, Prasetya MY. *Berdampak ke Pendapatan Daerah, Pemda Sentra Penghasilan Tembakau Usul Tarif Cukai Moderat*. VIVA.co.id, 12 September 2024. <https://www.viva.co.id/bisnis/1751477-berdampak-ke-pendapatan-daerah-pemda-sentra-penghasilan-tembakau-usul-tarif-cukai-moderat>.
126. Fahlevi F. *Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono Usulkan Tarif Moderat untuk Kenaikan CHT*. Tribunnews.com, 12 September 2024. <https://www.tribunnews.com/regional/2024/09/12/pj-gubernur-jatim-adhy-karyono-usulkan-tarif-moderat-untuk-kenaikan-cht>.
127. Dewan Sukarno Sebut Nilai Kenaikan Cukai Rokok Belum Tentu Turunkan Perokok. Kilasfakta.com, 23 Agustus 2024. <https://kilasfakta.com/dewan-sukarno-sebut-nilai-kenaikan-cukai-rokok-belum-tentu-turunkan-perokok/>.
128. Guntoro H. *Danang Harap Tidak Ada Kenaikan Cukai Hasil Tembakau Pada Tahun 2025*. Gesuri.id, 10 September 2024. <https://www.gesuri.id/pemerintahan/danang-harap-tidak-ada-kenaikan-cukai-hasil-tembakau-pada-tahun-2025-b2kDIZQpE>.
129. Sundari LS. *Kenaikan Tarif Cukai Tembakau Dikhawatirkan Picu Maraknya Rokok Illegal di Kota Cimahi*. Koran Gala, 21 Januari 2024. <https://www.koran-gala.id/news/58711592853/kenaikan-tarif-cukai-tembakau-dikhawatirkan-picu-maraknya-rokok-ilegal-di-kota-cimahi>.
130. Kamaludin H. *Peredaran Rokok Illegal di Cimahi Berpotensi Semakin Marak usai Tarif Cukai Naik 10 Persen*. TribunJabar.id, 22 Januari 2024. <https://jabar.tribunnews.com/2024/01/22/peredaran-rokok-ilegal-di-cimahi-berpotensi-semakin-marak-usai-tarif-cukai-naik-10-persen>.
131. Siswanto D. *Tarif Batal Naik, Setoran Cukai Rokok Menyusut di 2025*. Kontan.co.id, 8 Desember 2024. <https://nasional.kontan.co.id/news/tarif-batal-naik-setoran-cukai-rokok-menyusut-di-2025?>
132. Syafei FR, Maulana I. *Dedi Mulyadi Minta Tidak Ada Kenaikan Cukai untuk Tekan Peredaran Rokok Illegal*. Kompas.com, 20 Maret 2025. <https://regional.kompas.com/read/2025/03/20/042300078/dedi-mulyadi-minta-tidak-ada-kenaikan-cukai-untuk-tekan-peredaran-rokok>.
133. Abdurrahman N. *Dedi Mulyadi Minta Cukai Rokok Tidak Terus Naik, Jadi Pemicu Beredarnya Rokok Illegal*. TribunJabar.id, 20 Maret 2025. <https://jabar.tribunnews.com/2025/03/20/dedi-mulyadi-minta-cukai-rokok-tidak-terus-naik-jadi-pemicu-beredarnya-rokok-ilegal>.
134. Nurulliah N. *Cukai Rokok Mahal, Dedi Mulyadi Soroti Maraknya Peredaran Rokok Illegal di Jabar*. Pikiran Rakyat, 21 Maret 2025. <https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-019176737/cukai-rokok-mahal-dedi-mulyadi-soroti-maraknya-peredaran-rokok-ilegal-di-jabar>.
135. Wire P. *Dukung Industri Hasil Tembakau, Pemerintah Tetapkan Aturan Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau*. Antara, 27 Juli 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3654912/dukung-industri-hasil-tembakau-pemerintah-tetapkan-aturan-aglomerasi-pabrik-hasil-tembakau?utm>.
136. *Dukung Industri Hasil Tembakau, Pemerintah Tetapkan Aturan Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau*. Kemenkeu.go.id, 27 Juli 2023. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pemerintah-Tetapkan-Aturan-Aglomerasi-Pabrik-HT?utm>.
137. Masitoh S. *Pemerintah Kembali Beri Relaksasi Pelunasan Pita Cukai 90 Hari, Ini Tujuannya*. Kontan.co.id, 4 Februari 2024. <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-kembali-beri-relaksasi-pelunasan-pita-cukai-90-hari-ini-tujuannya>.
138. Vera Y. *Bantu Kinerja Keuangan Perusahaan Rokok, Menkeu Perpanjang Penundaan Bayar Pita Cukai*. Beritamu.co.id, 7 Februari 2024. <https://beritamu.co.id/2024/02/07/bantu-kinerja-keuangan-perusahaan-rokok-menkeu-perpanjang-penundaan-bayar-pita-cukai/183913/>.
139. *Bea Cukai Jatim I Beri Izin Fasilitas Kawasan Berikat ke Produsen E-Cigarette*. Beacukai.go.id, 5 Mei 2023. <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-jatim-i-beri-izin-fasilitas-kawasan-berikat-ke-produsen-e-cigarette.html>.
140. Sofian D. *Bea Cukai Dukung Perdagangan Internasional Melalui Program Ini*. JPNN.com, 8 Mei 2023. <https://www.jpnn.com/news/bea-cukai-dukung-perdagangan-internasional-melalui-program-ini>.
141. Gewati M. *Bea Cukai Yogyakarta Berikan Izin Tambah Lokasi Usaha ke Produsen Tembakau Iris*. Kompas.com, 26 April 2024. <https://regional.kompas.com/read/2024/04/26/100819078/bea-cukai-yogyakarta-berikan-izin-tambah-lokasi-usaha-ke-produsen-tembakau>.
142. Rakhmi BS. *Bea Cukai Yogyakarta Fasilitas PT Taru Martani Ekspor Tembakau Iris ke Jepang*. Tempo.co, 12 Maret 2025. <https://www.tempo.co/info-tempo/bea-cukai-yogyakarta-fasilitas-pt-taru-martani-ekspor-tembakau-iris-ke-jepang-1218604>.
143. Mahmud. *PT Besuki Raya Cigar Ekspor Cerutu ke Jerman*. Lintasperkoro.com, 23 Februari 2025. <https://lintasperkoro.com/baca-8467-pt-besuki-raya-cigar-ekspor-cerutu-ke-jerman>.

144. Senjaya IC. *Bea Cukai Semarang fasilitasi pembebasan cukai 6,2 juta rokok ekspor*. Antara News, 12 Maret 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4705125/bea-cukai-semarang-fasilitasi-pembebasan-cukai-62-juta-rokok-ekspor>.
145. Tasropi. *Bea Cukai Semarang Beri Fasilitas Tidak Dipungut Cukai, 6 Juta Batang Rokok Diekspor ke Malaysia*. Radar Semarang, 12 Maret 2025. <https://radarsemarang.jawapos.com/semarang/725753232/bea-cukai-semarang-beri-fasilitas-tidak-dipungut-cukai-6-juta-batang-rokok-diekspor-ke-malaysia>.
146. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.04/2017 Tahun 2017 tentang Tidak Dipungut Cukai*. Kementerian Keuangan, 2017. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/112656/pmk-no-59-pmk042017>.
147. Laoli N. *Jaga Nasib Pekerja Kretek Tangan, Pemerintah Diminta Kurangi Beban Cukai pada 2025*. Kontan.co.id, 13 Mei 2024. <https://nasional.kontan.co.id/news/jaga-nasib-pekerja-kretek-tangan-pemerintah-diminta-kurangi-beban-cukai-pada-2025>.
148. Ferdiansyah B. *Pekerja Minta Pemerintah Cermati Keberlanjutan Industri Hasil Tembakau*. Antara News, 13 Mei 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4101768/pekerja-minta-pemerintah-cermati-keberlanjutan-industri-hasil-tembakau>.
149. Triatmojo D. *Pemerintahan Baru Diharap Perhatikan Perlindungan Ekosistem Pertembakauan, Utamanya Padat Karya*. Tribunnews.com, 1 Maret 2024. <https://www.tribunnews.com/bisnis/2024/03/01/pemerintahan-baru-diharap-perhatikan-perlindungan-ekosistem-pertembakauan-utamanya-padat-karya>.
150. Fauziyah TA, Ihsanuddin. *Rp 6,4 Miliar Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Mulai Disalurkan ke Buruh Industri Tembakau*. Kompas.com, 5 Maret 2025. <https://regional.kompas.com/read/2025/03/05/203422778/rp-64-miliar-dana-bagi-hasil-cukai-tembakau-mulai-disalurkan-ke-buruh>.
151. Cahya C. *Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Mulai Salurkan Rp 6,4 Miliar DBHCT kepada Pekerja Industri Tembakau*. SuaraMerdeka.com, 5 Maret 2025. <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/0414692678/pemerintah-provinsi-jawa-tengah-mulai-salurkan-rp-64-miliar-dbhct-kepada-pekerja-industri-tembakau>.
152. Pardiana E. *Pj Gubernur Samsudin Panen Tembakau dan Serahkan Bantuan Pupuk di Lampung Timur*. Kabarsiger.com, 16 Agustus 2024. <https://kabarsiger.com/read/pi-gubernur-samsudin-panen-tembakau-dan-serahkan-bantuan-pupuk-di-lampung-timur>.
153. Umiyani A. *Anak Muda Gemar Vape, Penerimaan Cukai DKI Jakarta Mayoritas Disumbang Perokok Elektrik*. IDXChannel, 18 April 2023. <https://www.idxchannel.com/economics/anak-muda-gemar-vape-penerimaan-cukai-dki-jakarta-mayoritas-disumbang-perokok-elektrik>.
154. Hasyim LI. *Aroma Sendja Festival Perluas Pemasaran Tembakau Jabar*. RadarCirebon.com, 21 Juli 2024. <https://radarcirebon.disway.id/read/183536/aroma-sendja-festival-perluas-pemasaran-tembakau-jabar>.
155. AN001. *Pj Bupati Lotim Hadiri Acara Penyerahan Bantuan Mesin Pertanian*. AmpenanNews.com, 29 Agustus 2024. <https://www.ampenannews.com/2024/08/pi-bupati-lotim-hadiri-acara-penyerahan-bantuan-mesin-pertanian.html>.
156. Efendi H. *Ribuan Buruh Pabrik Rokok dan Petani Tembakau Akan Terima BLT, Dinsos P3A Sumenep Lakukan Validasi*. Madura Post, 20 Maret 2024. <https://madurapost.net/ribuan-buruh-pabrik-rokok-dan-petani-tembakau-akan-terima-blt-dinsos-p3a-sumenep-lakukan-validasi/>.
157. Tri S. *Buruh Rokok dan Petani Tembakau di Pati Bakal Dikucur Bansos DBHCT Senilai Jutaan*. Mondes.co.id, 4 Maret 2025. <https://www.mondes.co.id/buruh-rokok-dan-petani-tembakau-di-pati-bakal-dikucur-bansos-dbhct-senilai-jutaan/>.
158. Sholih M. *Pemkab Blora Salurkan Rp 4,9 Miliar Dana Bagi Hasil Cukai untuk 4.085 Buruh Tani Tembakau*. Suara Indonesia, 29 Desember 2023. <https://suaraindonesia.co.id/news/news/658d6415b04fb/Pemkab-Blora-Salurkan-Rp-49-Miliar-Dana-Bagi-Hasil-Cukai-untuk-4085-Buruh-Tani-Tembakau>.
159. Haniah I. *Hore! Petani Tembakau di Blora Terima BLT BLT DBHCT, per Orang Rp1,2 Juta*. Kuasakata.com, 29 Desember 2023. <https://kuasakata.com/read/berita/83912-hore-petani-tembakau-di-blora-terima-blt-blt-dbhct-per-orang-rp12-juta>.
160. Khalim AF. *Kabupaten Blora Kebagian Dana Bagi Hasil Cukai Rp22 Miliar, Jatah Tertinggi Didapat Dinas Kesehatan*. Radar Kudus, 8 Maret 2025. https://radarkudus.jawapos.com/blora/695736075/kabupaten-blora-kebagian-dana-bagi-hasil-cukai-rp22-miliar-jatah-tertinggi-didapat-dinas-kesehatan#google_vignette.
161. Nazaruddin A. *50.828 Buruh Rokok di Kudus Bakal Dapat BLT Sebelum Lebaran*. Antara News, 13 Maret 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4708177/50828-buruh-rokok-di-kudus-bakal-dapat-blt-sebelum-lebaran>.
162. Bustomi A. *BLT DBHCT untuk Buruh Rokok Bakal Disalurkan Enam Kali*. Suarabaru.id, 19 Maret 2024. <https://suarabaru.id/2024/03/19/blt-dbhct-untuk-buruh-rokok-bakal-disalurkan-enam-kali>.
163. Kunadi. *Pemkab Kendal Salurkan BLT dari DBHCT untuk Pekerja Sektor Tembakau*. SuaraMerdeka.com, 23 Maret 2025. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-raya/0414825644/pemkab-kendal-salurkan-blt-dari-dbhct-untuk-pekerja-sektor-tembakau>.
164. *Bupati Kendal Salurkan BLT DBHCT kepada 1.330 Pekerja*. Kendalkab.go.id, 22 Maret 2025. https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20250322001/bupati_kendal_salurkan_blt_dbhct_kepada_1330_pekerja.
165. Muhamad AA. *Hore, Buruh Pabrik Rokok di Karanganyar Terima BLT Rp4,7 Miliar*. Gatra.com, 2 Mei 2024. <https://www.gatra.com/news-597746-regional-hore-buruh-pabrik-rokok-di-karanganyar-terima-blt-rp47-miliar.html>.
166. Muntoha A. *Pemkab Kudus Buka 76 Paket Pelatihan di Tahun 2024*. Murianews.com, 6 Maret 2024. <http://berita.murianews.com/anggara-jiwandhana/410330/pemkab-kudus-buka-76-paket-pelatihan-di-tahun-2024>.
167. Masitoh I. *Tingkatkan Nilai Jual Tembakau, Pemkab Wonosobo Fasilitasi Pelatihan Blending Tembakau*. TribunJateng.com, 8 Maret 2024. <https://jateng.tribunnews.com/2024/03/08/tingkatkan-nilai-jual-tembakau-pemkab-wonosobo-fasilitasi-pelatihan-blending-tembakau>.
168. Mulyanto U. *Disperindagkop Batang Gelar Pelatihan Melinting Rokok, Ini Tujuannya*. Erapos Online, 15 Mei 2024. <https://www.era-pos.com/daerah/1034654938/disperindagkop-batang-gelar-pelatihan-melinting-rokok-ini-tujuannya>.
169. Purwadi H. *Adakan Pelatihan Linting Sigaret Kretek Tangan*. Disway Jateng, 16 Juli 2024. <https://jateng.disway.id/read/692451/adakan-pelatihan-linting-sigaret-kretek-tangan>.
170. Sul. *Sebanyak 12.698 Orang Petani Tembakau di Lotim Dilindungi*. Swara Konsumen Indonesia, 26 Maret 2024. <https://www.swarakonsumenindonesia.com/sebanyak-12-698-orang-petani-tembakau-di-lotim-dilindungi/>.
171. Yusuf A. *Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT)*. RadarBandung.id, 27 Maret 2024. <https://www.radarbandung.id/2024/03/27/perlindungan-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-melalui-penggunaan-dana-bagi-hasil-cukai-hasil-tembakau-dbhct/>.
172. Yogaalkambah. *BPJS Gratis dari DBHCT 2025: Siapa Saja yang Berhak Menerima?* Sumedang Ekspres, 9 Maret 2025. <https://sumedang.jabarekspres.com/2025/03/09/bpis-gratis-dari-dbhct-2025-siapa-saja-yang-berhak-menerima/>.
173. Noerkholis. *DKPP Kabupaten Pamekasan Alokasikan DBHCT 2024 Untuk Peningkatan Nilai Produksi Pertanian*. Bidiknasional.com, 18 Juli 2024. <https://bidiknasional.com/2024/07/18/dkpp-kabupaten-pamekasan-alokasikan-dbhct-2024-untuk-peningkatan-nilai-produksi-pertanian/>.
174. gas. *Ringankan Beban Petani, DKPP Pamekasan Bantu Mesin Perajang Tembakau dan Pembuat Pupuk Organik*. Global-news.co.id, 14 Agustus 2024. <https://global-news.co.id/2024/08/ringankan-beban-petani-dkpp-pamekasan-bantu-mesin-perajang-tembakau-dan-pembuat-pupuk-organik/>.

175. Hermiana. *15 Kelompok Tani di Banyumas Peroleh Bantuan Pupuk, Peralatan Hingga Pelatihan Pengolahan Pascapanen dari DBHCHT*. MetroJateng.com, 8 Maret 2025. <https://metrojateng.com/2025/03/08/15-kelompok-tani-di-banyumas-peroleh-bantuan-pupuk-peralatan-hingga-pelatihan-pengolahan-pascapanen-dari-dbhcht/>.
176. Sutisna N. *Kelompok Tani Tembakau di Sumedang Peroleh Bantuan Mesin Traktor dari DPKP*. Kabar Priangan, 29 Agustus 2024. <https://kabarpriangan.pikiran-rakyat.com/kabar-priangan/pr-1488500027/kelompok-tani-tembakau-di-sumedang-peroleh-bantuan-mesin-tractor-dari-dpkp>.
177. Yogaalkambah. *Pemanfaatan DBHCHT untuk Pengembangan Varietas Tembakau Unggulan di Sumedang*. Sumedang Ekspres, 4 September 2024. <https://sumedang.jabarekspres.com/2024/09/04/pemanfaatan-dbhcht-untuk-pengembangan-varietas-tembakau-unggulan-di-sumedang/>.
178. Sutrisna N. *DBHCHT Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Warga Sumedang, Terutama Sektor Ini*. Kabar Priangan, 19 Maret 2024. <https://kabarpriangan.pikiran-rakyat.com/kabar-priangan/pr-1487861039/dbhcht-dongkrak-pertumbuhan-ekonomi-warga-sumedang-terutama-sektor-ini>.
179. Sudastika. *Upaya Setda Kuningan Optimalkan Potensi Petani Tembakau*. Ciayumajakuning.id, 25 Juni 2024. <https://ciayumajakuning.id/2024/06/25/upaya-setda-kuningan-optimalkan-potensi-petani-tembakau/>.
180. Idrus. *Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) Pamekasan Tahap 3 Telan Anggaran Rp7 Miliar*. Kutipan, 7 Februari 2024. <https://kutipan.co/sentra-industri-hasil-tembakau-siht-pamekasan-tahap-3-telan-anggaran-rp7-miliar/>.
181. Margaretta F. *Bangun Sentra Industri Hasil Tembakau, Disperindag Pamekasan Siapkan Anggaran Rp 5 Miliar*. RadarMadura.id, 11 Januari 2024. <https://radarmadura.jawapos.com/pamekasan/743717954/bangun-sentra-industri-hasil-tembakau-disperindag-pamekasan-siapkan-anggaran-rp-5-miliar>.
182. Masum S. *Pembangunan SIHT Kudus Berlanjut, Dianggarkan Rp 11,3 M*. TribunJateng.com, 26 Januari 2024. <https://jateng.tribunnews.com/2024/01/26/pembangunan-siht-kudus-berlanjut-dianggarkan-rp-113-m>.
183. Nazaruddin A. *Pembangunan Gudang Produksi Rokok SIHT Kudus Ditargetkan Mulai April*. Antara News, 2 Maret 2024. <https://jateng.antaranews.com/berita/525987/pembangunan-gudang-produksi-rokok-siht-kudus-ditargetkan-mulai-april>.
184. Fernandez W. *Pemkab Kudus Target Lelang Pembangunan Gudang Produksi Rokok SIHT di Mei Tahun Ini*. VOI.id, 10 April 2024. <https://voi.id/ekonomi/372543/pemkab-kudus-target-lelang-pembangunan-gudang-produksi-rokok-siht-di-mei-tahun-ini>.
185. Rosidi A. *Pemkab Lombok Tengah Kucurkan Rp5 Miliar untuk Pembangunan KIHT*. Antara News, 2 Februari 2024. <https://mataram.antaranews.com/berita/323355/pemkab-lombok-tengah-kucurkan-rp5-miliar-untuk-pembangunan-kiht>.
186. Sipan R. *KIHT Kudus Dapat Alokasi Rp2 Miliar, Ini Peruntukannya*. Beritanews.id, 9 Februari 2024. <https://betanews.id/2024/02/kiht-kudus-dapat-alokasi-rp2-miliar-ini-peruntukannya.html>.
187. Purmadani M. *Lima Sektor Prioritas di Jatim Dioptimalkan untuk Genjot Penerimaan Negara. Berikut Rinciannya*. Radar Surabaya, 22 Maret 2024. <https://radasurabaya.jawapos.com/jatim/774470242/lima-sektor-prioritas-di-jatim-dioptimalkan-untuk-genjot-penerimaan-negara-berikut-rinciannya>.
188. *Jadi Komoditas Unggulan, Bupati Sugiri Harapkan Ada Temuan Bibit Unggul Tembakau*. Ponorogo.go.id, 20 Februari 2024. <https://ponorogo.go.id/2024/02/20/jadi-komoditas-unggulan-bupati-sugiri-harapkan-ada-temuan-bibit-unggul-tembakau/>.
189. Putra I. *Tembakau Jadi Potensi yang Menjanjikan*. SumedangEkspres.com, 29 April 2024. <https://sumedang.jabarekspres.com/2024/04/29/tembakau-jadi-potensi-yang-menjanjikan/>.
190. Bigwanto M. *Indonesia Tobacco Industry Interference Index 2023*. Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI), Juni 2023. <https://rukki.org/indonesia-tobacco-industry-interference-index-2023/>.
191. Kramer E, Ahsan A, Rees VW. *Policy Incoherence and Tobacco Control in Indonesia: An Analysis of the National Tobacco-related Policy Mix*. Tobacco Control, 6 Agustus 2021; 32:[410-7 pp.]. <https://doi.org/10.1136/tc-2023-058114>.
192. Syakriah A. *Loud and Clear: Youth Call for a Tobacco-Free Future*. UNICEF Indonesia, 12 Juli 2022. <https://www.unicef.org/indonesia/health/stories/youth-call-for-tobacco-free-future>.
193. Sahadewo GA. *Tobacco Economic Evidence: Indonesia*. Tobacconomics, Januari 2023. <https://www.economicsforhealth.org/files/research/823/indonesia-evidence-narrative-january-2023.pdf>.
194. *Pemkab Temanggung Siapkan Bantuan Benih Tembakau*. Temanggungkab.go.id, 26 April 2024. https://temanggungkab.go.id/frontend/d_berita/8109.
195. Alfath A. *288 Kelompok Tani Terima Bantuan Pupuk, Pj Bupati Temanggung Hary Agung Prabowo Mewanti-wanti: Bantuan ini Jangan Dijual*. RadarMagelang.id, 7 Mei 2024. <https://radarmagelang.jawapos.com/temanggung/684627438/288-kelompok-tani-terima-bantuan-pupuk-pj-bupati-temanggung-hary-agung-prabowo-mewanti-wanti-bantuan-ini-jangan-dijual>.
196. Sari. *Disnabun Gowa Kini Fokus Kembangkan Tembakau di Tombolopao dan Tompobulu*. Ujungjari.com, 14 Maret 2024. <https://www.ujungjari.com/2024/03/14/disnabun-gowa-kini-fokus-kembangkan-tembakau-di-tombolopao-dan-tompobulu/>.
197. Asnawi H. *Petani Kudus Panen Tembakau Saat Harga Belum Jelas, Dinas Pertanian Janji Bantu Pemasaran*. Suaramerdeka-muria.com, 11 Agustus 2024. <https://muria.suaramerdeka.com/ekonomi/0713318449/petani-kudus-panen-tembakau-saat-harga-belum-jelas-dinas-pertanian-janji-bantu-pemasaran>.
198. Utama TI. *Demi Alasan Ini, Bupati Demak Ajak Warga Lawan Peredaran Rokok Ilegal*. TribunJateng.com, 3 Mei 2023. <https://jateng.tribunnews.com/2023/05/03/demi-alasan-ini-bupati-demak-ajak-warga-lawan-peredaran-rokok-ilegal>.
199. Imron M. *Menteri Perdagangan Bertemu Petani Tembakau dan Pemilik Pabrik Rokok di Kediri, Ini yang Dibahas....* Tvonenews.com, 2 Agustus 2023. <https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/141996-menteri-perdagangan-bertemu-petani-tembakau-dan-pemilik-pabrik-rokok-di-kediri-ini-yang-dibahas?page=1>.
200. Ziqin YA. *Kunjungi Pabrik Rokok di Bojonegoro, Puan Maharani Bangga Pekerja Didominasi Perempuan*. TribunJatim.com, 19 Januari 2024. <https://jatim.tribunnews.com/2024/01/19/kunjungi-pabrik-rokok-di-bojonegoro-puan-maharani-bangga-pekerja-didominasi-perempuan>.
201. Wijayanto W. *Ketua DPR Puan Maharani Bangga Bisa Sambangi Gadis Kretek di Bojonegoro*. Suaramerdeka.com, 20 Januari 2024. <https://www.suaramerdeka.com/nasional/0411581832/ketua-dpr-puan-maharani-bangga-bisa-sambangi-gadis-kretek-di-bojonegoro>.
202. Rizaldi BA. *Ketua MPR Bambang Soesatyo Dorong Pengembangan Industri Tembakau Padat Karya*. Antara News, 3 Februari 2024. <https://riau.antaranews.com/berita/361128/ketua-mpr-bambang-soesatyo-dorong-pengembangan-industri-tembakau-padat-karya>.
203. Wijayanto N. *Sampoerna Buka Fasilitas Produksi SKT di Tegal dan Blitar, Serap 3.500 Pekerja*. SINDOnews.com, 17 Desember 2024. <https://ekbis.sindonews.com/read/1504321/34/sampoerna-buka-fasilitas-produksi-skt-di-tegal-dan-blitar-serap-3500-pekerja-1734412320>.
204. Fauzan AM. *BKPM resmikan pabrik rokok di Blitar dan Tegal senilai Rp630 miliar*. Antara News, 14 Desember 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4528612/bkpm-resmikan-pabrik-rokok-di-blitar-dan-tegal-senilai-rp630-miliar>.

205. Wamendag Menerima Kunjungan Pimpinan PT HM Sampoerna Tbk. Kemendag.go.id, 12 November 2024. <https://www.kemendag.go.id/index.php/berita/foto/wamendag-menerima-kunjungan-pimpinan-pt-hm-sampoerna-tbk>.
206. Miftahudin H. *Indonesia Perluas Ekspansi Ekspor Produk Tembakau Inovatif*. Metrotvnews.com, 26 Maret 2025. <https://www.metrotvnews.com/read/NOICAxEY-indonesia-perluas-ekspansi-ekspor-produk-tembakau-inovatif>.
207. Sampoerna Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Lokal di Karanganyar Untuk Produksi Sigaret Kretek Tangan. Jatengnews.id, 29 Maret 2024. <https://www.jatengnews.id/2024/03/29/sampoerna-tambah-kemitraan-dengan-pengusaha-lokal-di-karanganyar-untuk-produksi-sigaret-kretek-tangan/>.
208. Nugraha A. *Jadi Sumber Pendapatan Negara, BRIN Terlibat Pengembangan Varietas Unggul Tembakau*. Liputan6.com, 3 Mei 2024. <https://www.liputan6.com/regional/read/5585774/jadi-sumber-pendapatan-negara-brin-terlibat-pengembangan-varietas-unggul-tembakau?page=3>.
209. Fauzan AM. *Kemenperin: Industri Kertas Sigaret Bisa Serap Banyak Tenaga Kerja*. Antara, 19 Mei 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4112223/kemenperin-industri-kertas-sigaret-bisa-serap-banyak-tenaga-kerja>.
210. Nurfitri A. *Permintaan Terus Naik, Pemerintah Dukung Peluang Besar Ekspor dari Industri Linting Kertas Sigaret*. Warta Ekonomi. <https://wartaekonomi.co.id/read535461/permintaan-terus-naik-pemerintah-dukung-peluang-besar-ekspor-dari-industri-linting-kertas-sigaret>.
211. *KT&G's new CEO Kyung-man Bang embarks on overseas business operation visit, starting with the global export hub in Indonesia*. KT&G News, 26 April 2024. <https://en.ktng.com/ktngNewsView?cmsCd=CM0048&ntNo=704&src=&srcTemp=>.
212. Gubernur Arinal Kunjungi Petani Tembakau di Purbalinggo. Predikatnews, 27 Maret 2024. <https://predikatnews.com/2024/03/gubernur-arinal-kunjungi-petani-tembakau-di-purbalinggo/>.
213. Gubernur Arinal Djunaidi Tinjau Kebun Tembakau dan Unit Pengelolaan Tembakau di Kabupaten Lampung Timur. Sundalanews.com, 28 Maret 2024. <https://sundalanews.com/2024/03/gubernur-arinal-djunaidi-tinjau-kebun-tembakau-dan-unit-pengelolaan-tembakau-di-kabupaten-lampung-timur.html>.
214. Adhitya TE. *Sampoerna Ukir Sejarah, Resmikan Pabrik SKT MPS Dander di Bojonegoro untuk Angkat Ekonomi Masyarakat*. iNewsSurabaya.id, 30 Januari 2024. <https://surabaya.inews.id/read/401534/sampoerna-ukir-sejarah-resmikan-pabrik-skt-mps-dander-di-bojonegoro-untuk-angkat-ekonomi-masyarakat>.
215. *Resmikan MPS PT Kareb Gubernur Jatim Beri Apresiasi Atas Penyerapan Tenaga Kerja*. Bojonegoro.com, 30 Januari 2024. <https://www.bojonegoro.com/resmikan-mps-pt-kareb-gubernur-jatim-beri-apresiasi-atas-penyerapan-tenaga-kerja/>.
216. Mustajab I. *Resmikan Mitra Produksi Sigaret Dander, Khofifah Dorong Berkembangnya Usaha Padat Karya*. KanalIndonesia.com, 30 Januari 2024. <https://kanalindonesia.com/2024/01/30/resmikan-mitra-produksi-sigaret-dander-khofifah-dorong-berkembangnya-usaha-padat-karya/?utm>.
217. Arifin S. *Groundbreaking Pabrik KT&G, Kementerian Investasi/BKPM: Berikan Sinyal Positif bagi Investor*. TribunJatim.com, 26 April 2024. <https://jatim.tribunnews.com/2024/04/26/groundbreaking-pabrik-ktg-kementerian-investasibkpm-berikan-sinyal-positif-bagi-investor>.
218. Saputra AD. *Groundbreaking Pabrik KT&G di PIER Jadi Bukti Positifnya Iklim Investasi Jatim*. JPNN.com, 26 April 2024. <https://jatim.jpnn.com/jatim-terkini/29455/groundbreaking-pabrik-ktg-di-pier-jadi-bukti-positifnya-iklim-investasi-jatim>.
219. D RA. *DBHCHT Sukses Menunjang Program Pembangunan Pemkab Kudus*. TribunJateng.com, 15 Februari 2024. <https://jateng.tribunnews.com/2024/02/15/dbhcht-sukses-menunjang-program-pembangunan-pemkab-kudus>.
220. D RA. *Keberadaan KIHT dan SIHT Untuk Menunjang Perkembangan Bisnis Rokok di Kudus*. TribunJateng.com, 15 Februari 2024. https://jateng.tribunnews.com/2024/02/15/keberadaan-kiht-dan-siht-untuk-menunjang-perkembangan-bisnis-rokok-di-kudus#google_vignette.
221. Baihaqi H. *Indag Jabar Proyeksikan Garut Jadi Sentra Industri Hasil Tembakau*. Bisnis.com, 18 Maret 2024. <https://bandung.bisnis.com/read/20240318/550/1750237/indag-jabar-proyeksikan-garut-jadi-sentra-industri-hasil-tembakau>.
222. Raharjo A. *Jumlah Pabrik Rokok di Keresidenan Pati Kian Bertambah, Kini Mencapai 166 Pabrik*. Republika.co.id, 10 April 2024. <https://news.republika.co.id/berita/sbbg1w436/jumlah-pabrik-rokok-di-keresidenan-pati-kian-bertambah-kini-mencapai-166-pabrik>.
223. *Bea Cukai Purwokerto Dorong Pengembangan Industri Hasil Tembakau di Purbalingga*. Beacukai.go.id, 5 April 2024. <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-purwokerto-dorong-pengembangan-industri-hasil-tembakau-di-purbalingga.html>.
224. *APHT Lotim Diminta Tingkatkan Kualitas Produksi Rokok*. Radarlombok.co.id, 7 Januari 2024. <https://radarlombok.co.id/apht-lotim-diminta-tingkatkan-kualitas-produksi-rokok.html>.
225. Rofiq A. *Penurunan Angka Pengangguran di Kota Blitar pada 2023 Dorong Peluang Kerja Baru*. Jatim Times, 20 Februari 2024. <https://jatimtimes.com/baca/306402/20240220/043100/penurunan-angka-pengangguran-di-kota-blitar-pada-2023-dorong-peluang-kerja-baru>.
226. Junior MAM. *Pakar Soroti Efektivitas Metode THR untuk Kurangi Kebiasaan Merokok, Apa Manfaat dan Risikonya?* Tribunnews.com, 4 Februari 2025. <https://www.tribunnews.com/kesehatan/2025/02/04/pakar-soroti-efektivitas-metode-thr-untuk-kurangi-kebiasaan-merokok-apa-manfaat-dan-risikonya>.
227. *Pemerintah Fokus Tekan Prevalensi Perokok pada Anak, Apa Saja Caranya*. Tempo.co, 7 Februari 2025. <https://www.tempo.co/gaya-hidup/pemerintah-fokus-tekan-prevalensi-perokok-pada-anak-apa-saja-caranya-1203890>.
228. Prabowo KW. *Kemenkes Yakini Pendekatan THR dapat Hentikan Perokok*. Metrotvnews.com, 11 Februari 2025. <https://www.metrotvnews.com/read/NnjCer1y-kemenkes-yakin-pendekatan-thr-dapat-hentikan-perokok>.
229. Hamdani T. *Pemerintah Minta HM Sampoerna Bantu Program Kartu Prakerja*. Idntimes.com, 22 Juli 2024. <https://www.idntimes.com/business/economy/trio-hamdani/pemerintah-minta-hm-sampoerna-bantu-program-kartu-prakerja>.
230. Jatmika A. *Dorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, HM Sampoerna dan Kadin Indonesia Gelar "Pesta Rakyat UMKM untuk Indonesia"*. Kompas.com, 22 Juli 2024. <https://money.kompas.com/read/2024/07/22/184500426/dorong-pertumbuhan-ekonomi-inklusif-hm-sampoerna-dan-kadin-indonesia-gelar?page=all&utm>.
231. Imaduddin AH. *Ada Gudang Garam di Bandara Kediri yang Beroperasi 2023, berapa Nilainya? Investasi?* Tempo.co, 21 September 2022. <https://www.tempo.co/ekonomi/ada-gudang-garam-di-bandara-kediri-yang-beroperasi-2023-berapa-nilai-investasinya-286677>.
232. Priyanti M. *Gudang Garam (GGRM) Garap Tol Kediri-Tulungagung Senilai Rp9,92 Triliun*. Bareksa.com, 29 Februari 2024. <https://www.bareksa.com/berita/saham/2024-02-29/gudang-garam-ggrm-garap-tol-kediri-tulungagung-senilai-rp992-triliun?utm>.
233. Rahadi F. *Bangun Bangsa Conference 2024, Bentoel Group Pimpin Diskusi Dekarbonisasi Asia Pasifik*. Republika.co.id, 30 Oktober 2024. <https://rejogja.republika.co.id/berita/sm59a2291/bangun-bangsa-conference-2024-bentoel-group-pimpin-diskusi-dekarbonisasi-asia-pasifik>.
234. Rahayu EM. *Bentoel Group Pimpin Diskusi Dekarbonisasi di Asia Pasifik*. SWA, 27 Oktober 2024. <https://swa.co.id/read/452378/bentoel-group-pimpin-diskusi-dekarbonisasi-di-asia-pasifik>.

235. Andi D. *Pemerintah Rencanakan Proyek Mobil Nasional, Grup Djarum Tertarik?* Kompas.com, 14 Februari 2025. <https://money.kompas.com/read/2025/02/14/144100726/pemerintah-rencanakan-proyek-mobil-nasional-grup-djarum-tertarik-?>
236. *Sampoerna invest in new kretek cigarette factories for economic growth.* The Jakarta Post, 17 Desember 2024. <https://www.thejakartapost.com/front-row/2024/12/17/sampoerna-invest-in-new-kretek-cigarette-factories-for-economic-growth.html>.
237. *Social Pillar.* Sampoerna.com, 2024. <https://www.sampoerna.com/en/sustainability/managing-social-impact>.
238. *Boy Thohir: Djarum, Sampoerna, and Adaro to help Prabowo win the election.* IndonesiaBusinessPost.com, 23 Januari 2024. <https://indonesiabusinesspost.com/1580/Politics/boy-thohir-djarum-sampoerna-and-adaro-to-help-prabowo-win-the-election>.
239. *Gaprindo Respons Hati-Hati atas Kenaikan Harga Jual Eceran Rokok pada 2025.* JagatBisnis.com, 3 Desember 2024. <https://jagatbisnis.com/2024/12/03/gaprindo-respons-hati-hati-atas-kenaikan-harga-jual-eceran-rokok-pada-2025/#gsc.tab=0>.
240. *Willem Petrus Riwu : Pemberantasan Rokok Ilegal Menjadi Tanggung Jawab Bersama.* TabloidMantap.com, 9 Mei 2024. <https://tabloidmantap.com/daerah/willem-petrus-riwu-pemberantasan-rokok-ilegal-menjadi-tanggung-jawab-bersama/>.
241. Badan Riset dan Inovasi Nasional RI. *Surat Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional No. 9/II/KP/2023 tentang Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.* Badan Riset dan Inovasi Nasional RI, 2 Januari 2023. https://ugc.production.linktr.ee/7PRmfzXOSSKHmmsUc0vW_SK%20Penempatan%20ASN%20di%20lingkungan%20BRIN%202023.pdf.
242. Badan Tenaga Nuklir Nasional. *Laporan Kegiatan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tahun 2018* 31 Januari 2019. <https://karya.brin.go.id/id/eprint/9043/1/Laporan%20Kegiatan%20BSDMO%202018-Gabung.pdf>.
243. Nurcahyani I. *Asosiasi konsumen dukung BRIN riset produk tembakau alternatif.* Antara, 14 Februari 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3395757/asosiasi-konsumen-dukung-brin-riset-produk-tembakau-alternatif>.

Lampiran: Sumber Informasi

Sumber Data

Pemantauan harian media (cetak dan daring) dari eBdesk antara tanggal 1 April 2023 hingga 31 Maret 2025. Sumber informasi tambahan digunakan untuk klarifikasi ketika dibutuhkan:

	PERUSAHAAN TEBKAU TERBESAR	PANGSA PASAR	MEREK	SUMBER
1	Gudang Garam	32,3%	GG Filter, GG Surya, dll.	https://www.gudanggaramtbk.com/
2	HM Sampoerna/PMI	32,0%	A Mild, Marlboro, dll.	https://www.sampoerna.com/
3	Djarum Group	17,5%	Djarum Super, LA, dll.	https://www.djarum.com/
4	Bentoel Group/BAT	7,9%	Dunhill, Lucky Strike, dll.	http://www.bentoelgroup.com/

	KELOMPOK PENDUKUNG/SEKUTU INDUSTRI TEBKAU TERBESAR	JENIS (FRONT GROUP, AFILIASI, INDIVIDU)	SUMBER
1	Putera Sampoerna Foundation	Afiliasi Industri	http://www.sampoernafoundation.org/
2	Djarum Foundation	Afiliasi Industri	http://www.djarumfoundation.org/
3	APTI (Asosiasi Petani Tembakau Indonesia)	Front Group	http://petanitembakau.blogspot.co.id/
4	GAPRINDO (Gabungan Pengusaha Rokok Putih Indonesia)	Afiliasi Industri	-
5	GAPPRI (Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia)	Afiliasi Industri	-
6	APVI (Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia)	Afiliasi Industri	https://apvi.id/
7	Komunitas Kretek	Front Group	http://komunitaskretek.or.id/
8	AKVINDO (Asosiasi Konsumen Vape Indonesia)	Front Group	https://akvindo.com
9	AKRINDO (Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia)	Afiliasi Industri	-
10	AMLI (Asosiasi Perusahaan Media Luar-Griya Indonesia)	Afiliasi Industri	https://amli.or.id
11	AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia)	Afiliasi Industri	https://amsi.or.id/
12	AMTI (Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia)	Front Group	-
13	APCI (Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia)	Afiliasi Industri	https://apci.id/
14	APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia)	Afiliasi Industri	https://apindo.or.id/
15	APMI (Asosiasi Promotor Musik Indonesia)	Afiliasi Industri	https://apmi.co.id/
16	APPNINDO (Aliansi Pengusaha Penghantar Nikotin Elektronik Indonesia)	Front Group	-
17	APRINDO (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia)	Afiliasi Industri	https://aprindo.org/
18	APREL (Asosiasi Produsen Rokok Elektrik Indonesia)	Front Group	-
19	ARVINDO (Asosiasi Ritel Vape Indonesia)	Front Group	-
20	ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia)	Afiliasi Industri	https://atvsi.or.id/
21	AVI (Asosiasi Vaper Indonesia)	Front Group	-
22	CoEHAR (Center of Excellence for the Acceleration of Harm Reduction)	Afiliasi Industri	https://www.coehar.org/

23	FSP RTMM-SPSI (Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia)	Afiliasi Industri	https://www.serikatpekerjartmm.com/entang-pp-fsp-rtmm-spsi/
24	GAPERO (Gabungan Perusahaan Rokok)	Afiliasi Industri	https://id1204952-gabungan-pengusaha-rokok-gapero.contact.page/
25	GSBI (Gabungan Serikat Buruh Indonesia)	Afiliasi Industri	-
26	HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia)	Afiliasi Industri	-
27	ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia)	Afiliasi Industri	https://icmi.id
28	IDA (Indonesia Digital Association)	Afiliasi Industri	-
29	IKAPPI (Ikatan Pedagang Pasar Indonesia)	Afiliasi Industri	-
30	INDEF (Institute for Development of Economic and Finance)	Afiliasi Industri	https://indef.or.id/en/
31	KADIN (Kamar Dagang dan Industri)	Afiliasi Industri	https://kadin.id
32	KERIS (Komite Ekonomi Rakyat Indonesia Semesta)	Afiliasi Industri	-
33	KMT (Koalisi Masyarakat Tembakau)	Front Group	-
34	KPTNI (Kumpulan Pecinta Tabacum Nusantara Indonesia)	Front Group	-
35	Lakpesdam PBNU (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama)	Afiliasi Industri	https://www.lakpesdam.or.id
36	LBM PBNU (Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama)	Afiliasi Industri	-
37	LKRI (Lembaga Konsumer Rokok Indonesia)	Front Group	-
38	P3I (Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia)	Afiliasi Industri	https://p3i-pusat.com/
39	P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat)	Afiliasi Industri	https://www.p3m.or.id
40	SPN (Serikat Pekerja Nasional)	Afiliasi Industri	https://spn.or.id/
41	YPKP (Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik)	Afiliasi Industri	-
42	PPRK (Persatuan Perusahaan Rokok Kudus)	Front Group	-
43	KABAR (Koalisi Indonesia Bebas Tar)	Afiliasi Industri	https://koalisibebastar.com/
44	Paguyuban Petani Pedagang Tembakau Magelang (P3TM)	Front Group	-



**INDUSTRI ROKOK TIDAK HANYA
MENJUAL PRODUK BERBAHAYA,
TAPI JUGA MEMBELI PENGARUH
DENGAN BERBAGAI CARA.**